SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu mengatur mekanisme dan pelaksana perjalanan dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur.

6. Aparatur ...

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di instansi Pemerintah.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
8. Pegawai Honorer adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kutai Timur untuk Tenaga Kerja Kontrak Daerah dan Tenaga Ahli DPRD diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi serta Pemerintah Daerah.
9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar Tempat Kedudukannya baik seorang maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atau atas perintah Pejabat yang berwenang.
10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
12. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat Kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali Perjalanan Dinas pindah atas permohonan sendiri.
13. Lumpsum adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
14. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dibubuhi cap/stempel oleh Lembaga ataupun Badan Usaha ataupun Penyedia Jasa yang sesuai dibidangnya.
15. Uang representasi adalah tambahan biaya yang diberikan bagi seseorang yang menduduki suatu jabatan dalam rangka perjalanan dinas.
16. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.

17. Surat ...

17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang kepada pelaksana perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas.
18. Tempat Kedudukan adalah tempat satuan kerja berada.
19. Tempat tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi Tempat tujuan perjalanan dinas.
20. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
21. Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting adalah Izin untuk melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu karena alasan penting yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang.
22. Paspor Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Paspor Dinas adalah dokumen yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang berangkat ke Luar Negeri dalam rangka penugasan.
23. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
24. Pihak Ketiga adalah perusahaan swasta dan lembaga di dalam negeri, pemerintah negara asing, badan dan organisasi internasional, badan swasta asing dan perusahaan swasta asing.
25. Anggota Keluarga adalah meliputi suami/isteri dan anak.
26. Pihak Lain adalah orang perorangan Warga Negara Indonesia selain Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Pejabat lain yang melakukan Perjalanan Dinas termasuk Anggota Keluarga yang sah dan pengikut rombongan lainnya.

Pasal 2 ...

Pasal 2

(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, ASN, dan Tenaga Honorer atau Tenaga Ahli DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasan dalam bentuk SPT yang ditindaklanjuti dengan Penerbitan SPD.

(2) Pejabat yang berwenang menandatanganani SPT dan SPD sebagai berikut:

a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib Dewan;
b. Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
c. Pejabat Eselon II/b Kepala Dinas/Badan dan Kepala Kantor ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, terkecuali bilamana Sekretaris Daerah tidak berada di tempat atau sedang melaksanakan tugas penandatanganan Surat Perintah Tugas dapat ditandatangani oleh Asisten yang membidanginya;
d. Pejabat Eselon III pada Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon IV pada Lingkungan Sekretariat Daerah ditanda tangani oleh Pejabat Eselon III/selaku atasan langsung;
e. Pejabat Eselon IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon III pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Sekwan;
f. Pejabat Eselon IV pada Kantor ditandatangani oleh Kepala Kantor;
g. Pegawai Non Eselon (staf), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Honorer pada SKPD dan Kantor ditandatangani oleh Pejabat Eselon III;
h. Pegawai Non Eselon (staf) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh Pejabat Eselon III dan/atau Pejabat Eselon IV;
i. Tenaga Ahli DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan berdasarkan rekomendasi Ketua Fraksi/Ketua Pansus; dan

j. dalam ...

j. Dalam hal Pejabat yang berwenang menandatangai SPT dan SPD berhalangan, maka dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat dibawahnya.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Honorer yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Perjalanan Dalam Negeri; dan
   b. Perjalanan Luar Negeri.

(3) Perjalanan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
   b. Perjalanan Dinas Pindah.

(4) Perjalanan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Perjalanan Dinas;
   b. Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

b. ketersediaan ...

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas jabatan

Pasal 5

(1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, melewati batas kota dan/atau dalam kota dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.

(2) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
c. pengumandahan (datasering);
d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cidera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan

k. menjemput ...

k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pasal 6

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digolongkan menjadi:
   a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota; dan
   b. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota.

(2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari:
   a. Perjalanan Dinas dalam Kota;
   b. Perjalanan Dinas Biasa;
   c. Perjalanan Dinas Tetap;
   d. Perjalanan Dinas paket meeting dalam kota; dan
   e. Perjalanan Dinas paket meeting luar kota.

(3) Perjalanan Dinas dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Kota bagi Pejabat Daerah, ASN, Pegawai Honorer dan Pihak Lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

(4) Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan melewati batas Kota dan Perjalanan Dinas Pindah bagi Pejabat Daerah, ASN, Pegawai Honorer dan dan Pihak Lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan melewati batas Kota dan/atau dalam Kota untuk kepentingan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan jumlah Pejabat yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk kegiatan pelayanan masyarakat yang pelaksanaannya bersifat rutin.

(6) Perjalanan Dinas paket meeting dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah

Daerah...

Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta.

(7) Perjalanan Dinas paket meeting luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan yang dilaksanakan di luar kota dengan paket meeting (*fullboard/fullday/halfday*) pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya Perjalanan Dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 7

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
   a. tingkat A Pejabat Negara lainnya untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara;
   b. tingkat B untuk Anggota DPRD/Pejabat Eselon II dan Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Utama, serta Pejabat lainnya yang setara;
   c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ASN Golongan IV;
   d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/ASN Golongan III dan PPPK Golongan IX s/d XVII, Fungsional Ahli Pertama s/d Muda; dan
   e. tingkat E ASN Golongan II, ASN Golongan I, Jabatan Fungsional Terampil, PPPK Golongan I s/d VIII dan Pegawai Honorer.

(2) Tingkat penggolongan dan moda transportasi perjalanan dinas disesuaikan dengan jenis tingkatan penggolongan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati.

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

a. uang harian dan atau uang harian diklat;

b. biaya...

b. biaya transport;
c. biaya penginapan;
d. Uang representasi perjalanan dinas;
e. biaya menjemput/mengantar jenazah;
f. biaya kemahalan; dan
g. uang kegiatan pemeriksaan.

Pasal 9

(1) Uang harian dibayarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan:
a. dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
b. melewati batas kota.

(2) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

(3) Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

(4) Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara Lumpsum sesuai dengan jumlah hari Riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam SPT.

(5) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi dari 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota diberikan uang harian pendidikan dan pelatihan.

(6) Penugasan Perjalanan Dinas dalam kota yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan dan merupakan satu kesatuan penugasan dan/atau waktu pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan sebesar 1 (satu) kali uang harian dalam kota.

(7) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dengan tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan perjalanan dinas yang tercantum di dalam Dokumen

Pelaksanaan ...

Pelaksanaan Anggaran, yang dikarenakan adanya undangan atau acara kegiatan dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu membuat telaahan staf yang mendapatkan persetujuan Kepala Satuan Perangkat Daerah dengan mengacu standar biaya Perjalanan Dinas yang tercantum di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (apabila standar biaya perjalanan dinas di tempat tujuan lebih besar dari standar biaya perjalanan dinas dari tempat tujuan semula maka standar biaya perjalanan dinas yang digunakan adalah sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas semula).

(8) Besaran pemberian uang harian untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan melewati batas kota, dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dan mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas:

a. biaya tranportasi darat;
b. biaya carter kendaraan;
c. biaya taksi; dan
d. biaya transport/tiket berdasarkan fasilitas transportasi pergi pulang.

(2) Dalam hal perjalanan dinas perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan dinas opersional sewa dapat diberikan biaya bahan bakar minyak dengan besaran harga perliter sesuai standarisasi yang ditetapkan pemerintah sebagai pengganti biaya transportasi senilai biaya transportasi (PP) atau Carter (one way) dengan batasan tertinggi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(3) Pengganti biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan tanda bukti pembelian BBM dari SPBU atau bukti pembelian yang sah. Apabila tidak mendapatkan bukti pembelian yang sah maka melampirkan surat pernyataan rill (khusus perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur yang tidak terdapat SPBU).

(4) Biaya ...

(4) Biaya carter kendaraan adalah biaya transportasi perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur dari Tempat Kedudukan sampai Tempat tujuan keberangkatan dan biaya kepulangan dari tempat tugas menuju Tempat Kedudukan semula yang merupakan Biaya riil.

(5) Biaya carter kendaraan khusus diperuntukkan bagi pelaksana perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur diberikan kepada yang melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) orang yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dan biaya carter hanya diberikan kepada 1 (satu) orang untuk 1 (satu) kali pelaksanaan perjalanan dinas yang merupakan biaya keberangkatan dan kepulangan (bukan sewa) yang merupakan biaya riil, selebihnya pelaksana perjalanan dinas tidak diberikan biaya transportasi.

(6) Biaya tranportasi dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur/carter kendaraan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan dibayarkan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas disertai Surat Tugas dan tidak bersifat rutin yang berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati.

(7) Biaya sewa kendaraan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur digunakan hanya untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan kegiatan insidentil yang digunakan untuk kebutuhan sifatnya tidak terus menerus sebagaimana biaya sewa kendaraan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati.

(8) Biaya bantuan BBM perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan sewa disesuaikan dengan tanda bukti pembelian BBM dari SPBU atau bukti pembelian yang sah. Apabila tidak mendapatkan bukti yang sah maka melampirkan surat pernyataan rill.

(9) Dalam hal satuan biaya transportasi darat belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

(10) Perjalanan Dinas Jabatan melewati batas kota diberikan biaya taksi untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi meliputi:

a. biaya ...

a. biaya taksi keberangkatan:
   1. dari kantor Tempat Kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat tujuan; dan
   2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju Tempat tujuan.

b. biaya taksi kepulangan:
   1. dari Tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; dan
   2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor Tempat Kedudukan asal.

c. termasuk biaya tol dan/ atau retribusi yang dipungut di terminal bus/bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(11) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

(12) Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

(13) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam Lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

(14) Satuan biaya transport/tiket berdasarkan fasilitas transportasi dan jenis kelas angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
   a. di hotel; atau
   b. di tempat menginap lainnya.

(2) Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan:

a. dibayarkan ...

a. dibayarkan sesuai Biaya riil berdasarkan jumlah hari yang digunakan; dan

b. diberikan kepada Pejabat/Pegawai/atau Pimpinan/Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan / kursus / workshop / seminar / pelatihan / bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.

(3) Dalam hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota Tempat tujuan; dan

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Lumpsum.

(4) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan dalam hal:

a. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dengan paket fullboard; atau

b. mengikuti pendidikan dan pelatihan yang disediakan penginapan oleh panitia penyelenggara sesuai bukti rill.

(5) Penyetaraan tingkat biaya penginapan untuk Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, ditentukan oleh PA yang menanggung pembebanan biaya Perjalanan Dinas berkenaan sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

(6) Besaran satuan biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Uang representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat

Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

(2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara Lumpsum sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.

(3) Besaran Uang representasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah yang meliputi:

a. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

b. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

c. biaya untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, selain biaya perjalanan dinas seperti dimaksud pada Pasal 8 juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana diatur pada Lampiran V pada Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:
   1. biaya pemetian; dan
   2. biaya angkutan jenazah.

Pasal 14

Biaya Kemahalan diberikan pada perjalanan dinas dalam kota (dalam wilayah Kutai Timur), biaya kemahalan diberikan kepada seluruh ASN dan Pegawai Honorer atas dasar sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan kemahalan biaya makan, penambah daya tahan tubuh dan cucian pakaian (laundry), biaya kemahalan diberikan secara lumpsum.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Biaya pemeriksaan merupakan biaya yang dibayarkan bagi pejabat serta Pegawai Inspektorat yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dalam rangka menjalankan tugas kegiatan Pendampingan, Pengawasan (Audit), Review, Evaluasi, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Audit Atas Permintaan, dan Pemeriksaan Khusus (Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat).

Pasal 16

Keikutsertaan Pihak Lain dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas jabatan, hanya dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan yang memang membutuhkan keterlibatan yang bersangkutan ataupun diundang dalam suatu kegiatan oleh instansi/lembaga tertentu, yang berperan dalam mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Dalam hal Perjalanan Dinas jabatan untuk instansi/lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang biayanya dibebankan pada DPA SKPD sebagai penyelenggara, penandatanganan pengesahan keberangkatan dari Tempat Kedudukan dan pengesahan tiba kembali SPD dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang yang memberikan SPT dan SPD di instansi/lembaga bersangkutan.

Pasal 18

(1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan tambahan uang harian.
(2) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

Kepada ...

kepada PA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:

a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/Penyedia Transportasi Lainnya; dan/atau;
b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

(3) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, Uang representasi yang telah diterimanya kepada Bendahara.

Pasal 19

(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b ditanggung panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud tidak dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD pelaksana SPD.

(2) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sebagian panitia penyelenggara, sebagian biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dapat dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD pelaksana SPD.

(3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, pertemuan, kunjungan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat

ayat (1) tidak ditanggung oleh Panitia Penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA/DPPA-SKPD Pelaksana SPD.

(4) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Dan Prosedur

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 20

(1) Lama Perjalanan Dinas untuk setiap kali penugasan maksimal 4 (empat) hari untuk perjalanan dinas di luar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan maksimal 5 (lima) hari untuk perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi batas maksimal yang dibuktikan dengan surat/telex/fax dari instansi pemanggil.

(2) ASN dan Tenaga Honorer yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis maupun fungsional yang telah membayar biaya pelatihan (kontribusi) diberikan perjalanan dinas selama 2 (dua) hari untuk menuju tempat pelatihan dan kepulangan menuju tempat asal keberangkatan.

(3) Untuk selebihnya diberikan uang harian diklat sesuai Pasal 8 huruf a selama mengikuti pelatihan.

(4) Untuk kegiatan selain mengikuti pelatihan teknis dan fungsional yang pelaksanaannya melebihi hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 21

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA/DPPA satuan kerja penerbit SPT.

(2) Pembayaran biaya perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja berkenaan.

(3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat dibayarkan sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.

(4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

(5) Besarnya uang harian, Uang representasi, biaya transport dan atau biaya

Carter ...

carter kendaraan serta biaya hotel/penginapan untuk Pejabat Negara, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, ASN dan Pegawai Honorer diatur dalam Lampiran II dan Lampiran IV pada Peraturan Bupati ini.

(6) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Pengeluaran SKPD, sedangkan Biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari biaya yang seharusnya berdasarkan bukti riil sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dan standarisasi biaya perjalanan dinas, bendahara pengeluaran wajib membayarkan sisa dari kekurangan tersebut.

BAB V
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

(1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan Perjalanan ke Luar Negeri.

(2) Perjalanan ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Perjalanan Dinas; dan
b. Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting.

Bagian Kedua
Izin Perjalanan ke Luar Negeri
Pasal 23

(1) Perjalanan ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal (22), wajib mendapatkan izin dari Menteri.

(2) Dalam memberikan izin Perjalanan ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 24

(1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (22) ayat (2) huruf a, memenuhi kriteria:
   a. selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
   b. transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas;
   c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja Kementerian dan Pemerintahan Daerah;
   d. efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
   e. kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
   f. keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Kementerian dan Pemerintahan Daerah.

(2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak dapat dilakukan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam waktu yang bersamaan.

(3) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

(1) Dalam melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah wajib didampingi Pejabat administrasi dan/atau Pejabat fungsional pada perangkat daerah yang menangani tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan tujuan Perjalanan Dinas.

(2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan Perjalanan Dinas

Berkaitan ...

berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Perjalanan Dinas dapat didampingi oleh Pejabat administrasi dan/atau Pejabat fungsional pada Perangkat Daerah terkait.

(3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 27

(1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (22) ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:
   a. penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri;
   b. tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri;
   c. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
   d. kunjungan persahabatan;
   e. pendidikan dan pelatihan;
   f. studi banding;
   g. seminar;
   h. lokakarya;
   i. konferensi;
   j. pertemuan Internasional;
   k. penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau
   l. narasumber/pembicara.

(2) Hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk:
   a. peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
   b. peningkatan pendapatan asli daerah;
   c. peningkatan kualitas daerah dan mewujudkan kesejahteraan daerah; dan
   d. mewujudkan inovasi untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan nama kegiatan, jadwal, dan tempat kegiatan yang dimuat dalam undangan.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, tidak dapat dilakukan, dalam hal:

a. terjadi bencana alam di wilayahnya;
b. terjadi bencana sosial di wilayahnya;
c. pemilihan umum legislatif;
d. pemilihan Presiden dan wakil Presiden; dan
e. pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Administrasi Perjalanan Dinas

Pasal 29

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan Perjalanan Dinas harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas.

(2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas;
   b. surat persetujuan Perjalanan Dinas;
   c. Paspor Dinas yang masih berlaku;
   d. Exit Permit; dan
   e. Visa untuk negara tertentu.

(3) Pengajuan permohonan administrasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri.
(2) Surat permohonan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. surat ...

a. surat undangan/surat balasan kunjungan dari negara atau tempat yang dituju/surat konfirmasi dari KBRI;
b. kerangka acuan kerja;
c. salinan daftar pelaksanaan anggaran atau daftar isian pelaksanaan anggaran;
d. jadwal pelaksanaan kegiatan;
e. rincian biaya perjalanan dinas;
f. data personil peserta;
g. surat keterangan keabsahan dokumen dari unit kerja; dan
h. keterangan urgensi keikutsertaan peserta.

(3) Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
a. nama dan jabatan;
b. nomor induk pegawai bagi ASN;
c. tujuan kegiatan;
d. manfaat;
e. kota/negara yang dituju;
f. waktu pelaksanaan; dan
g. sumber pendanaan.

Pasal 31

(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), disertai dengan lampiran berupa dokumen yang sesuai dengan tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

(2) Lampiran dokumen yang disesuaikan dengan tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Perjalanan Dinas dengan tujuan penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri, disertai dengan kajian rencana kerja sama.
b. Perjalanan Dinas dengan tujuan tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri dan/atau pertemuan internasional, disertai dengan surat pernyataan kehendak dan/atau naskah kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Perjalanan ...

c. Perjalanan Dinas dengan tujuan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah, disertai dengan surat profil daerah yang akan dipromosikan.
d. Perjalanan Dinas dengan tujuan kunjungan persahabatan, disertai dengan surat konfirmasi perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
e. Perjalanan Dinas dengan tujuan pendidikan dan pelatihan, disertai dengan keterangan untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan bidang masing-masing dari negara yang dituju.
f. Perjalanan Dinas dengan tujuan studi banding disertai dokumen yang menyatakan urgensi dari pelaksanaan studi banding dimaksud.
g. Perjalanan Dinas dengan tujuan seminar dan lokakarya, disertai keterangan urgensitas seminar/lokakarya yang akan dihadiri dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi.
h. Perjalanan Dinas dengan tujuan konferensi dan pertemuan internasional, disertai undangan dari Kementerian/Lembaga terkait.
i. Perjalanan Dinas dengan tujuan penandatangan naskah kerja sama, disertai dengan surat persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
j. PDLN dengan tujuan menjadi narasumber/pembicara, disertai dengan surat keterangan bahwa biaya ditanggung oleh negara pengundang.

Bagian Kelima

Pengajuan Rekomendasi Izin Perjalanan Dinas

Pasal 32

(1) Bupati mengajukan surat permohonan untuk penerbitan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, kepada Sekretaris Jenderal melalui Gubernur untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota serta ASN di lingkungan kabupaten/kota.

(2) Gubernur meneruskan surat permohonan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) Hari setelah permohonan diterima oleh Gubernur.

(3) Kepala ...

(3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah yang melakukan perjalanan ke Luar Negeri tanpa izin dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada:

a. Wakil Gubernur;

b. Sekretaris Daerah; atau

c. asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kepegawaian.

Pasal 33

(1) Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama atas nama Sekretaris Jenderal dapat menerbitkan surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas untuk ASN di lingkungan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), serta meneruskan kepada Kementerian Sekretariat Negara atau menolak permohonan disertai dengan alasan.

(2) Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama atas nama Sekretaris Jenderal menerbitkan surat rekomendasi permohonan Paspor Dinas dan/atau Exit Permit dan / atau rekomendasi Visa untuk pemohon Perjalanan Dinas di lingkungan Kementerian, provinsi, kabupaten, dan/atau kota yang ditujukan kepada Direktorat yang membidangi konsuler di Kementerian Luar Negeri.

Pasal 34

Surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diteruskan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk memperoleh surat persetujuan ke Luar Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Surat permohonan beserta lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan melalui unit layanan administrasi/Sistem Online Kemendagri.

(2) Surat ...

(2) Surat permohonan beserta lampiran dokumen dari provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima paling lama 10 (sepuluh) Hari sebelum keberangkatan.

Bagian Keenam

Jumlah Peserta Perjalanan Dinas dan Jangka Waktu

Pasal 36

(1) Peserta Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling banyak 5 (lima) orang termasuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah.

(2) Peserta PDLN lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
   a. penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri yang wajib mengikutsertakan organisasi perangkat daerah terkait;
   b. mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
   c. kunjungan persahabatan; atau
   d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 37

(1) Jangka waktu Perjalanan Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

(2) Jangka Waktu Perjalanan Dinas lebih dari 7 (tujuh) hari kalender dalam hal:

(3) Perundingan dan atau konferensi internasional atas dasar penunjukan langsung oleh pimpinan untuk mewakili negara.

(4) Delegasi kesenian dan kebudayaan untuk promosi dan pameran potensi dan budaya daerah.

(5) Pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketujuh

Pengesahan Perjalanan Dinas

Pasal 38

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas

Harus ...

harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri untuk mendapat pengesahan.

(2) Dalam hal wilayah tujuan Perjalanan Dinas tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas harus mendapat pengesahan dari Pejabat setempat yang berwenang.

Bagian Kedelapan

Perjalanan Dinas ke Negara Yang Tidak Mempunyai Hubungan Diplomatik

Pasal 39

Perjalanan Dinas ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Kementerian Luar Negeri melalui permohonan dari Kementerian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pembatalan atau Perubahan Jadwal Perjalanan Dinas

Pasal 40

Perjalanan Dinas yang tidak jadi dilaksanakan/terjadi pembatalan dan perubahan jadwal, pemohon izin Perjalanan Dinas menyampaikan surat pemberitahuan pembatalan atau perubahan jadwal Perjalanan Dinas sebelum keberangkatan, dengan menyebutkan alasan pembatalan kepada Kementerian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negera serta melampirkan surat rekomendasi awal yang telah terbit.

Bagian Kesepuluh

Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Oleh Pihak Ketiga

Pasal 41

(1) Penyampaian permohonan Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh Pihak Ketiga disertai dengan surat pernyataan dibiayai dari Pihak Ketiga.

(2) Surat ...

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bagian Kesebelas

Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting

Pasal 42

(1) Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting dilakukan untuk:
   a. melaksanakan ibadah agama;
   b. menjalani pengobatan; dan
   c. kepentingan keluarga.

(2) Kepentingan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk:
   a. menghadiri acara wisuda anak, istri/suami;
   b. mengurus pendidikan Anggota Keluarga;
   c. mendampingi anak, istri/suami yang sedang menjalani pengobatan di Luar Negeri;
   d. menghadiri perkawinan Anggota Keluarga; dan
   e. kedukaan Anggota Keluarga.

(3) Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting.

Pasal 43

(1) Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting tidak dapat dilakukan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam waktu yang bersamaan, selain karena keperluan kedukaan Anggota Keluarga.

(2) Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting tidak dapat diberikan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan dan bencana alam, kecuali untuk menjalani pengobatan, kegiatan keagamaan dan kedukaan Anggota Keluarga.

Pasal 44

(1) Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting

Untuk ...

untuk melaksanakan ibadah agama meliputi:

a. surat keterangan terdaftar sebagai peserta perjalanan ibadah agama oleh penyelenggara ibadah keagamaan;
b. surat pernyataan perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan; dan
c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum.

(2) Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk menjalani pengobatan meliputi:

a. surat keterangan yang memberikan rekomendasi untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit dan atau klinik di Luar Negeri;
b. surat pernyataan perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan; dan
c. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum

(3) Persyaratan pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk kepentingan keluarga meliputi:

a. surat undangan atau pemberitahuan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan kepada yang bersangkutan atas pelaksanaan wisuda anak, istri/suami di Luar Negeri;
b. surat keterangan dokter dari rumah sakit dan atau klinik di Luar Negeri yang menyatakan Anggota Keluarga yang bersangkutan dalam perawatan;
c. surat undangan perkawinan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;
d. surat pemberitahuan adanya berita kedukaan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;
e. surat pemberitahuan adanya kepentingan Anggota Keluarga yang bersangkutan di Luar Negeri;
f. surat pernyataan perjalanan ke Luar Negeri dengan biaya sendiri oleh yang bersangkutan; dan
g. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum.

Bagian Kedua belas

Jangka Waktu

Pasal 45

(1) Jangka waktu Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk

menjalankan ibadah haji diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dan untuk menjalankan ibadah agama selain haji paling lama 15 (lima belas) hari kalender.

(2) Jangka waktu Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk menjalani pengobatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender.

(3) Jangka waktu Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting untuk kepentingan keluarga paling lama 5 (lima) Hari.

Bagian Ketiga belas

Tata Cara Pemberian Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting

Pasal 46

(1) Bupati, wakil bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD mengajukan permohonan

(2) Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting kepada Menteri melalui gubernur disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(3) Gubernur meneruskan surat permohonan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) Hari setelah permohonan diterima oleh gubernur.

(4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke Luar Negeri tanpa izin dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri memberikan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi bupati, wakil bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 48

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menolak permohonan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi bupati, wakil bupati, Pimpinan dan

Anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 49

(1) Surat permohonan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting beserta lampiran dokumen disampaikan melalui unit layanan administrasi/Sistem Online Kemendagri.

(2) Surat permohonan beserta lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan kecuali menjalani pengobatan yang mendesak menurut tenaga kesehatan atau kepentingan keluarga yang mendesak berupa kedukaan Anggota Keluarga, atau mendampingi anak, istri/suami yang sedang menjalani pengobatan di Luar Negeri.

Bagian Ketiga Belas

Pelaporan

Pasal 50

(1) Bupati, wakil bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah melaporkan hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama.

(2) Laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah selesai melakukan Perjalanan Dinas.

(3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan Perjalanan Dinas berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

(4) Format laporan hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat belas

Pendanaan

Pasal 51

(1) Pendanaan Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan yang berasal dari Pihak Ketiga.

(2) Pendanaan untuk Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting berasal dari biaya pribadi.

(3) Biaya tiket luar negeri dan uang harian luar negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima belas

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 52

(1) Unit kerja pada Kementerian yang melaksanakan Fasilitasi Kerja Sama menyusun data base Perjalanan Dinas, laporan hasil Perjalanan Dinas dan Izin Perjalanan ke Luar Negeri dengan Alasan Penting yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan monitoring, evaluasi hasil Perjalanan Dinas.

Bagian Keenam belas

Ketentuan Lain

Pasal 53

Pihak Lain yang diikutsertakan dalam Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kutai Timur dapat diberikan izin Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Dalam hal perjalanan dinas mengikutsertakan Anggota Keluarga, permohonan perjalanan dinas diajukan dengan melampirkan surat keterangan ikut serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Keikutsertaan Anggota Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan dengan biaya pribadi.

Pasal 55 ...

Pasal 55

Pemerintahan Daerah dalam melakukan Perjalanan Dinas dapat meminta pendampingan dari Pemerintah Pusat dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 56

(1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

(2) SPD harus mendapatkan pengesahan oleh Pejabat yang berwenang.

(3) Penghitungan besar jumlah biaya Perjalanan Dinas dicatat secara terperinci dalam Lampiran SPD.

(4) Untuk perhitungan jumlah hari Perjalanan Dinas dalam SPD dicantumkan:
   a. tanggal berangkat dari Tempat Kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh PPTK/KPA/PA;
   b. tanggal tiba dan berangkat di/dari Tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang dituju; dan
   c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang.

Pasal 57

(1) ASN yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas sebagai pendukung pertanggung jawaban sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan membuat laporan sesuai dengan mekanisme pada DPRD.

(3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) dilampiri dokumen:

a. surat perintah yang sah dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat tujuan Perjalanan Dinas;

c. bukti tiket, boarding pass pesawat/kapal air / keeta / bus, bukti biaya masuk/retribusi/airport tax bandara udara/pelabuhan/stasiun kereta/terminal bus pergi pulang, dan/atau bukti pembayaran modal transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya tranportasi;

d. bukti pembayaran uang harian, Uang representasi dan uang hotel/penginapan 30% cukup dengan lampiran tanda terima yang mencantumkan seluruh pembiayaan pada rincian biaya perjalanan dinas yang diketahui oleh PA/KPA;

e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;

f. bukti pembayaran yang sah untuk biaya transportasi maupun carter kendaraan berupa kuitansi maupun tiket yang dibubuhi stempel yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan atau jasa transportasi ataupun bukti pembayaran lainnya; dan

g. pernyataan kebenaran pengeluaran biaya riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dari Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c dan huruf e tidak diperoleh / hilang / rusak / mengalami musibah/ pencurian/kondisi tertentu lainnya sehingga bukti pengeluaran riil sulit diperoleh dan/atau tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kuitansi, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil dengan menyatakan bahwa daftar pengeluaran dimaksud adalah pengganti bukti pengeluaran yang hilang/rusak dan/atau yang sulit diperoleh, yang disetujui oleh PA/KPA.

Pasal 58 ...

Pasal 58

(1) PA/KPA melakukan Perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(2) PA/KPA/PPTK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.

(3) PA/KPA/PPTK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

(4) Selisih biaya transport perjalanan dinas yang telah diterima dengan Biaya riil, dikembalikan ke bendahara pengeluaran.

(5) Format rincian biaya dan kuitansi/bukti pembayaran perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

(1) Pejabat berwenang yang memberikan SPT, menerbitkan SPD, dan yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan.

(2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:

a. tuntutan ganti rugi kerugian daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

b. hukuman administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, ASN dan Tenaga Honorer dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

(2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, ASN

Dan ...

dan Tenaga Honorer yang menerima biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 61

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 62

(1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersumber dari dana transfer yang bersifat terikat dan penggunaannya sudah ditentukan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Biaya lainnya dapat ditanggung dalam komponen biaya Perjalanan Dinas selama dipersyaratkan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 101

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,

Jamuar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 101 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

TINGKATAN PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

NO	TINGKAT PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Tingkat A** Pejabat Negara Lainnya untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Ketua /Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara.	BISNIS	KELAS IA/VIP	SPESIAL/EKSEKUTIV E	Menyesuaikan
2	**Tingkat B** untuk Anggota DPRD/Pejabat Eselon II dan Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Utama, serta Pejabat lainnya yang setara.	EKONOMI	KELAS IB	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
3	**Tingkat C** untuk Pejabat Esselon III/PNS Gol IV.	EKONOMI	KELAS IIA	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
4	**Tingkat D** untuk Pejabat Esselon IV/PNS Golongan III dan PPPK Golongan IX s/d XVII, Fungsional Ahli Pertama s/d Muda.	EKONOMI	KELAS IIA	EKSEKUTIVE	Menyesuaikan
5	**Tingkat E** PNS Golongan II, PNS Golongan I, Jabatan Fungsional Terampil, PPPK Golongan I s/d VIII dan Pegawai Honorer.	EKONOMI	EKONOMI	EKONOMI	Menyesuaikan

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,

Januar Dayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 101 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

A. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG (PP) DAN SWAB PCR /ANTIGEN

1. BIAYA SWAB PCR / ANTIGEN

URAIAN	SATUAN	HARGA
BIAYA SWAB PCR/ANTIGEN	Orang/kali	Rp 300,000

2. BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Ambon	Rp 13,285,000	Rp 7,081,000
2	Jakarta	Balikpapan	Rp 7,412,000	Rp 3,797,000
3	Jakarta	Banda Aceh	Rp 7,519,000	Rp 4,492,000
4	Jakarta	Bandar Lampung	Rp 2,407,000	Rp 1,583,000
5	Jakarta	Banjarmasin	Rp 5,252,000	Rp 2,995,000
6	Jakarta	Batam	Rp 4,867,000	Rp 2,888,000
7	Jakarta	Bengkulu	Rp 4,364,000	Rp 2,621,000
8	Jakarta	Biak	Rp 14,065,000	Rp 7,519,000
9	Jakarta	Denpasar	Rp 5,305,000	Rp 3,262,000
10	Jakarta	Gorontalo	Rp 7,231,000	Rp 4,824,000
11	Jakarta	Jambi	Rp 4,065,000	Rp 2,460,000
12	Jakarta	Jayapura	Rp 14,568,000	Rp 8,193,000
13	Jakarta	Yogyakarta	Rp 4,107,000	Rp 2,268,000
14	Jakarta	Kendari	Rp 7,658,000	Rp 4,182,000
15	Jakarta	Kupang	Rp 9,413,000	Rp 5,081,000
16	Jakarta	Makassar	Rp 7,444,000	Rp 3,829,000
17	Jakarta	Malang	Rp 4,599,000	Rp 2,695,000
18	Jakarta	Mamuju	Rp 7,295,000	Rp 4,867,000
19	Jakarta	Manado	Rp 10,824,000	Rp 5,102,000
20	Jakarta	Manokwari	Rp 16,226,000	Rp 10,824,000
21	Jakarta	Mataram	Rp 5,316,000	Rp 3,230,000
22	Jakarta	Medan	Rp 7,252,000	Rp 3,808,000
23	Jakarta	Padang	Rp 5,530,000	Rp 2,952,000
24	Jakarta	Palangkaraya	Rp 4,984,000	Rp 2,984,000
25	Jakarta	Palembang	Rp 3,861,000	Rp 2,268,000
26	Jakarta	Palu	Rp 9,348,000	Rp 5,113,000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp 3,412,000	Rp 2,139,000
28	Jakarta	Pekanbaru	Rp 5,583,000	Rp 3,016,000
29	Jakarta	Pontianak	Rp 4,353,000	Rp 2,781,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	Jakarta	Semarang	Rp 3,861,000	Rp 2,182,000
31	Jakarta	Solo	Rp 3,861,000	Rp 2,342,000
32	Jakarta	Surabaya	Rp 5,466,000	Rp 2,674,000
33	Jakarta	Ternate	Rp 10,001,000	Rp 6,664,000
34	Jakarta	Timika	Rp 13,830,000	Rp 7,487,000
35	Ambon	Denpasar	Rp 8,054,000	Rp 4,471,000
36	Ambon	Jayapura	Rp 7,434,000	Rp 4,161,000
37	Ambon	Kendari	Rp 4,824,000	Rp 2,856,000
38	Ambon	Makassar	Rp 6,022,000	Rp 3,455,000
39	Ambon	Manokwari	Rp 5,177,000	Rp 3,027,000
40	Ambon	Palu	Rp 6,140,000	Rp 3,508,000
41	Ambon	Sorong	Rp 3,637,000	Rp 2,257,000
42	Ambon	Surabaya	Rp 8,803,000	Rp 4,845,000
43	Ambon	Ternate	Rp 4,022,000	Rp 2,449,000
44	Balikpapan	Banda Aceh	Rp 12,739,000	Rp 6,749,000
45	Balikpapan	Batam	Rp 10,354,000	Rp 5,305,000
46	Balikpapan	Denpasar	Rp 10,739,000	Rp 5,648,000
47	Balikpapan	Jayapura	Rp 19,071,000	Rp 10,086,000
48	Balikpapan	Yogyakarta	Rp 9,669,000	Rp 4,749,000
49	Balikpapan	Makassar	Rp 12,664,000	Rp 6,150,000
50	Balikpapan	Manado	Rp 18,702,000	Rp 7,295,000
51	Balikpapan	Medan	Rp 12,493,000	Rp 6,140,000
52	Balikpapan	Padang	Rp 10,942,000	Rp 5,369,000
53	Balikpapan	Palembang	Rp 9,445,000	Rp 4,749,000
54	Balikpapan	Pekanbaru	Rp 10,996,000	Rp 5,423,000
55	Balikpapan	Semarang	Rp 9,445,000	Rp 4,674,000
56	Balikpapan	Solo	Rp 9,445,000	Rp 4,813,000
57	Balikpapan	Surabaya	Rp 10,889,000	Rp 5,113,000
58	Balikpapan	Timika	Rp 18,408,000	Rp 9,445,000
59	Balikpapan	Bandung	Rp 7,412,000	Rp 3,797,000
60	Balikpapan	Banjarmasin	Rp -	Rp 2,400,000
61	Balikpapan	Palangkaraya	Rp -	Rp 3,797,000
62	Balikpapan	Kupang	Rp 10,750,000	Rp 5,615,000
63	Balikpapan	Labuan Bajo	Rp 10,750,000	Rp 5,615,000
64	Balikpapan	Sangatta	Rp -	Rp 1,150,000
65	Banda Aceh	Denpasar	Rp 10,835,000	Rp 6,279,000
66	Banda Aceh	Jayapura	Rp 19,167,000	Rp 10,717,000
67	Banda Aceh	Yogyakarta	Rp 9,765,000	Rp 5,380,000
68	Banda Aceh	Makassar	Rp 12,760,000	Rp 6,781,000
69	Banda Aceh	Manado	Rp 15,798,000	Rp 7,926,000
70	Banda Aceh	Pontianak	Rp 9,990,000	Rp 5,840,000
71	Banda Aceh	Semarang	Rp 9,530,000	Rp 5,305,000
72	Banda Aceh	Solo	Rp 9,530,000	Rp 5,444,000
73	Banda Aceh	Surabaya	Rp 10,985,000	Rp 5,744,000
74	Banda Aceh	Timika	Rp 18,504,000	Rp 10,076,000
75	Bandar Lampung	Balikpapan	Rp 8,129,000	Rp 4,126,000
76	Bandar Lampung	Banda Aceh	Rp 8,225,000	Rp 4,760,000
77	Bandar Lampung	Banjarmasin	Rp 6,193,000	Rp 3,412,000
78	Bandar Lampung	Batam	Rp 5,840,000	Rp 3,316,000
79	Bandar Lampung	Biak	Rp 17,119,000	Rp 7,487,000
80	Bandar Lampung	Denpasar	Rp 6,236,000	Rp 3,647,000
81	Bandar Lampung	Jayapura	Rp 14,568,000	Rp 8,097,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET			
	ASAL	TUJUAN	BISNIS		EKONOMI	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
82	Bandar Lampung	Yogyakarta	Rp	5,155,000	Rp	2,760,000
83	Bandar Lampung	Kendari	Rp	8,354,000	Rp	4,482,000
84	Bandar Lampung	Makassar	Rp	8,161,000	Rp	4,161,000
85	Bandar Lampung	Malang	Rp	5,594,000	Rp	3,134,000
86	Bandar Lampung	Manado	Rp	11,199,000	Rp	5,305,000
87	Bandar Lampung	Mataram	Rp	6,246,000	Rp	3,626,000
88	Bandar Lampung	Medan	Rp	7,979,000	Rp	4,150,000
89	Bandar Lampung	Padang	Rp	6,439,000	Rp	3,380,000
90	Bandar Lampung	Palangkaraya	Rp	5,947,000	Rp	3,401,000
91	Bandar Lampung	Palembang	Rp	4,931,000	Rp	2,760,000
92	Bandar Lampung	Pekanbaru	Rp	6,482,000	Rp	3,433,000
93	Bandar Lampung	Pontianak	Rp	5,380,000	Rp	3,220,000
94	Bandar Lampung	Samarinda	Rp	8,129,000	Rp	4,129,000
95	Bandar Lampung	Semarang	Rp	4,931,000	Rp	2,685,000
96	Bandar Lampung	Solo	Rp	4,931,000	Rp	2,824,000
97	Bandar Lampung	Surabaya	Rp	6,386,000	Rp	3,123,000
98	Bandar Lampung	Timika	Rp	13,905,000	Rp	7,455,000
99	Bandung	Batam	Rp	6,289,000	Rp	3,583,000
100	Bandung	Denpasar	Rp	5,626,000	Rp	3,252,000
101	Bandung	Jakarta	Rp	2,064,000	Rp	1,476,000
102	Bandung	Jambi	Rp	5,006,000	Rp	2,941,000
103	Bandung	Yogyakarta	Rp	3,369,000	Rp	2,129,000
104	Bandung	Padang	Rp	6,129,000	Rp	3,508,000
105	Bandung	Palembang	Rp	4,385,000	Rp	2,631,000
106	Bandung	Pangkal Pinang	Rp	4,599,000	Rp	2,738,000
107	Bandung	Pekanbaru	Rp	6,525,000	Rp	3,701,000
108	Bandung	Semarang	Rp	3,027,000	Rp	1,957,000
109	Bandung	Solo	Rp	3,647,000	Rp	2,268,000
110	Bandung	Surabaya	Rp	4,824,000	Rp	2,856,000
111	Bandung	Tanjung Pandan	Rp	4,439,000	Rp	2,663,000
112	Banjarmasin	Banda Aceh	Rp	10,792,000	Rp	6,022,000
113	Banjarmasin	Batam	Rp	8,407,000	Rp	4,578,000
114	Banjarmasin	Biak	Rp	16,686,000	Rp	8,749,000
115	Banjarmasin	Denpasar	Rp	8,792,000	Rp	4,920,000
116	Banjarmasin	Jayapura	Rp	17,135,000	Rp	9,359,000
117	Banjarmasin	Yogyakarta	Rp	7,723,000	Rp	4,022,000
118	Banjarmasin	Medan	Rp	10,546,000	Rp	5,412,000
119	Banjarmasin	Padang	Rp	9,006,000	Rp	4,642,000
120	Banjarmasin	Palembang	Rp	7,498,000	Rp	4,022,000
121	Banjarmasin	Pekanbaru	Rp	9,049,000	Rp	4,696,000
122	Banjarmasin	Semarang	Rp	7,498,000	Rp	3,958,000
123	Banjarmasin	Solo	Rp	7,498,000	Rp	4,097,000
124	Banjarmasin	Surabaya	Rp	8,942,000	Rp	4,385,000
125	Banjarmasin	Timika	Rp	16,472,000	Rp	8,717,000
126	Batam	Banda Aceh	Rp	10,439,000	Rp	5,936,000
127	Batam	Denpasar	Rp	8,450,000	Rp	4,824,000
128	Batam	Jayapura	Rp	16,782,000	Rp	9,263,000
129	Batam	Yogyakarta	Rp	7,370,000	Rp	3,936,000
130	Batam	Makassar	Rp	10,375,000	Rp	5,337,000
131	Batam	Manado	Rp	13,413,000	Rp	6,648,200
132	Batam	Medan	Rp	10,193,000	Rp	5,316,000
133	Batam	Padang	Rp	8,653,000	Rp	4,546,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET			
	ASAL	TUJUAN	BISNIS		EKONOMI	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
134	Batam	Palembang	Rp	7,145,000	Rp	3,936,000
135	Batam	Pekanbaru	Rp	8,707,000	Rp	4,599,000
136	Batam	Pontianak	Rp	7,594,000	Rp	4,396,000
137	Batam	Semarang	Rp	7,145,000	Rp	3,861,000
138	Batam	Solo	Rp	7,145,000	Rp	4,000,000
139	Batam	Surabaya	Rp	8,600,000	Rp	4,300,000
140	Batam	Timika	Rp	16,119,000	Rp	8,621,000
141	Bengkulu	Palembang	Rp	2,899,000	Rp	1,893,000
142	Biak	Balikpapan	Rp	18,622,000	Rp	9,477,000
143	Biak	Banda Aceh	Rp	18,718,000	Rp	10,108,000
144	Biak	Batam	Rp	16,333,000	Rp	8,664,000
145	Biak	Denpasar	Rp	16,729,000	Rp	8,995,000
146	Biak	Jayapura	Rp	3,615,000	Rp	2,321,000
147	Biak	Yogyakarta	Rp	15,648,000	Rp	8,108,000
148	Biak	Manado	Rp	11,734,000	Rp	6,353,000
149	Biak	Medan	Rp	18,472,000	Rp	9,498,000
150	Biak	Padang	Rp	16,932,000	Rp	8,728,000
151	Biak	Palembang	Rp	15,424,000	Rp	8,108,000
152	Biak	Pekanbaru	Rp	16,985,000	Rp	8,781,000
153	Biak	Pontianak	Rp	15,873,000	Rp	8,568,000
154	Biak	Samarinda	Rp	18,622,000	Rp	9,477,000
155	Biak	Surabaya	Rp	12,782,000	Rp	7,081,000
156	Biak	Timika	Rp	5,808,000	Rp	3,444,000
157	Denpasar	Jayapura	Rp	11,680,000	Rp	6,845,000
158	Denpasar	Kupang	Rp	5,091,000	Rp	2,952,000
159	Denpasar	Makassar	Rp	4,182,000	Rp	2,631,000
160	Denpasar	Manado	Rp	7,851,000	Rp	4,278,000
161	Denpasar	Mataram	Rp	1,840,000	Rp	1,390,000
162	Denpasar	Medan	Rp	10,589,000	Rp	5,658,000
163	Denpasar	Padang	Rp	9,049,000	Rp	4,888,000
164	Denpasar	Palangkaraya	Rp	8,557,000	Rp	4,909,000
165	Denpasar	Palembang	Rp	7,541,000	Rp	4,278,000
166	Denpasar	Pekanbaru	Rp	9,092,000	Rp	4,942,000
167	Denpasar	Pontianak	Rp	7,990,000	Rp	4,738,000
168	Denpasar	Timika	Rp	10,140,000	Rp	6,129,000
169	Jambi	Balikpapan	Rp	7,733,000	Rp	4,407,000
170	Jambi	Banjarmasin	Rp	7,690,000	Rp	4,193,000
171	Jambi	Denpasar	Rp	7,733,000	Rp	4,439,000
172	Jambi	Yogyakarta	Rp	6,653,000	Rp	3,551,000
173	Jambi	Kupang	Rp	11,434,000	Rp	6,075,000
174	Jambi	Makassar	Rp	9,659,000	Rp	4,952,000
175	Jambi	Malang	Rp	7,091,000	Rp	3,925,000
176	Jambi	Manado	Rp	12,707,000	Rp	6,097,000
177	Jambi	Palangkaraya	Rp	7,444,000	Rp	4,193,000
178	Jambi	Pontianak	Rp	6,878,000	Rp	4,011,000
179	Jambi	Samarinda	Rp	7,733,000	Rp	4,407,000
180	Jambi	Semarang	Rp	6,428,000	Rp	3,476,000
181	Jambi	Solo	Rp	6,428,000	Rp	3,615,000
182	Jambi	Surabaya	Rp	7,883,000	Rp	3,915,999
183	Jayapura	Yogyakarta	Rp	13,274,000	Rp	7,690,000
184	Jayapura	Manado	Rp	22,109,000	Rp	11,263,000
185	Jayapura	Medan	Rp	18,932,000	Rp	10,097,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET			
	ASAL	TUJUAN	BISNIS		EKONOMI	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
186	Jayapura	Padang	Rp	17,381,000	Rp	9,327,000
187	Jayapura	Palembang	Rp	15,873,000	Rp	8,717,000
188	Jayapura	Pekanbaru	Rp	17,435,000	Rp	9,380,000
189	Jayapura	Pontianak	Rp	16,322,000	Rp	9,177,000
190	Jayapura	Timika	Rp	3,615,000	Rp	2,289,000
191	Yogyakarta	Denpasar	Rp	3,861,000	Rp	2,481,000
192	Yogyakarta	Makassar	Rp	6,525,000	Rp	3,893,000
193	Yogyakarta	Manado	Rp	10,536,000	Rp	5,722,000
194	Yogyakarta	Medan	Rp	9,519,000	Rp	4,770,000
195	Yogyakarta	Padang	Rp	7,969,000	Rp	4,000,000
196	Yogyakarta	Palembang	Rp	6,460,000	Rp	3,380,000
197	Yogyakarta	Pekanbaru	Rp	8,022,000	Rp	4,054,000
198	Yogyakarta	Pontianak	Rp	6,910,000	Rp	3,840,000
199	Yogyakarta	Timika	Rp	11,894,000	Rp	7,038,000
200	Kendari	Banda Aceh	Rp	12,953,000	Rp	7,102,000
201	Kendari	Batam	Rp	10,568,000	Rp	5,658,000
202	Kendari	Denpasar	Rp	5,455,000	Rp	3,273,000
203	Kendari	Yogyakarta	Rp	8,129,000	Rp	4,706,000
204	Kendari	Padang	Rp	11,167,000	Rp	5,722,000
205	Kendari	Palembang	Rp	9,659,000	Rp	5,102,000
206	Kendari	Pekanbaru	Rp	11,220,000	Rp	5,776,000
207	Kendari	Semarang	Rp	9,659,000	Rp	5,027,000
208	Kendari	Solo	Rp	9,659,000	Rp	5,166,000
209	Kendari	Surabaya	Rp	11,103,000	Rp	5,466,000
210	Kendari	Timika	Rp	18,633,000	Rp	9,798,000
211	Kupang	Jayapura	Rp	14,386,000	Rp	8,108,000
212	Kupang	Yogyakarta	Rp	7,348,000	Rp	4,182,000
213	Kupang	Makassar	Rp	7,637,000	Rp	4,311,000
214	Kupang	Manado	Rp	11,648,000	Rp	6,140,000
215	Kupang	Surabaya	Rp	6,749,000	Rp	3,722,000
216	Makassar	Biak	Rp	8,493,000	Rp	4,931,000
217	Makassar	Jayapura	Rp	10,193,000	Rp	5,787,000
218	Makassar	Kendari	Rp	2,663,000	Rp	1,786,000
219	Makassar	Manado	Rp	5,327,000	Rp	2,909,000
220	Makassar	Timika	Rp	11,723,000	Rp	6,567,000
221	Malang	Balikpapan	Rp	10,108,000	Rp	5,134,000
222	Malang	Banda Aceh	Rp	10,204,000	Rp	5,765,000
223	Malang	Banjarmasin	Rp	8,161,000	Rp	4,407,000
224	Malang	Batam	Rp	7,819,000	Rp	4,311,000
225	Malang	Biak	Rp	16,087,000	Rp	8,482,000
226	Malang	Jayapura	Rp	16,536,000	Rp	9,092,000
227	Malang	Kendari	Rp	10,322,000	Rp	5,487,000
228	Malang	Makassar	Rp	10,129,000	Rp	5,166,000
229	Malang	Manado	Rp	13,167,000	Rp	6,311,000
230	Malang	Medan	Rp	9,958,000	Rp	5,145,000
231	Malang	Padang	Rp	8,418,000	Rp	4,385,000
232	Malang	Palangkaraya	Rp	7,915,000	Rp	4,407,000
233	Malang	Palembang	Rp	6,899,000	Rp	3,765,000
234	Malang	Pekanbaru	Rp	8,461,000	Rp	4,439,000
235	Malang	Samarinda	Rp	10,108,000	Rp	5,134,000
236	Malang	Timika	Rp	15,873,000	Rp	8,461,000
237	Manado	Medan	Rp	15,552,000	Rp	7,316,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET			
	ASAL	TUJUAN	BISNIS		EKONOMI	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
238	Manado	Padang	Rp	14,012,000	Rp	6,546,000
239	Manado	Palembang	Rp	12,504,000	Rp	5,926,000
240	Manado	Pekanbaru	Rp	14,055,000	Rp	6,599,000
241	Manado	Pontianak	Rp	12,953,000	Rp	6,396,000
242	Manado	Semarang	Rp	12,504,000	Rp	5,851,000
243	Manado	Solo	Rp	12,504,000	Rp	5,990,000
244	Manado	Surabaya	Rp	9,937,000	Rp	5,262,000
245	Manado	Timika	Rp	16,183,000	Rp	8,995,000
246	Mataram	Balikpapan	Rp	10,750,000	Rp	5,615,000
247	Mataram	Banda Aceh	Rp	10,845,000	Rp	6,246,000
248	Mataram	Banjarmasin	Rp	8,803,000	Rp	4,888,000
249	Mataram	Batam	Rp	8,461,000	Rp	4,803,000
250	Mataram	Biak	Rp	11,552,000	Rp	6,546,000
251	Mataram	Jayapura	Rp	13,092,000	Rp	7,327,000
252	Mataram	Yogyakarta	Rp	4,417,000	Rp	2,781,000
253	Mataram	Makassar	Rp	4,717,000	Rp	2,909,000
254	Mataram	Manado	Rp	8,717,000	Rp	4,738,000
255	Mataram	Medan	Rp	10,600,000	Rp	5,637,000
256	Mataram	Padang	Rp	9,060,000	Rp	4,867,000
257	Mataram	Palembang	Rp	7,551,000	Rp	4,246,000
258	Mataram	Pekanbaru	Rp	9,102,000	Rp	4,909,000
259	Mataram	Pontianak	Rp	8,001,000	Rp	4,706,000
260	Mataram	Samarinda	Rp	10,750,000	Rp	5,615,000
261	Mataram	Surabaya	Rp	3,829,000	Rp	2,321,000
262	Medan	Banda Aceh	Rp	3,466,000	Rp	2,193,000
263	Medan	Makassar	Rp	12,514,000	Rp	6,172,000
264	Medan	Pontianak	Rp	9,733,000	Rp	5,230,000
265	Medan	Semarang	Rp	9,284,000	Rp	4,696,000
266	Medan	Solo	Rp	9,284,000	Rp	4,835,000
267	Medan	Surabaya	Rp	10,739,000	Rp	5,134,000
268	Medan	Timika	Rp	18,258,000	Rp	9,455,000
269	Padang	Makassar	Rp	10,974,000	Rp	5,402,000
270	Padang	Pontianak	Rp	8,193,000	Rp	4,460,000
271	Padang	Semarang	Rp	7,744,000	Rp	3,925,000
272	Padang	Solo	Rp	7,744,000	Rp	4,065,000
273	Padang	Surabaya	Rp	9,199,000	Rp	4,364,000
274	Padang	Timika	Rp	16,718,000	Rp	8,685,000
275	Palangkaraya	Banda Aceh	Rp	10,546,000	Rp	6,022,000
276	Palangkaraya	Batam	Rp	8,161,000	Rp	4,578,000
277	Palangkaraya	Yogyakarta	Rp	7,477,000	Rp	4,022,000
278	Palangkaraya	Mataram	Rp	8,557,000	Rp	4,888,000
279	Palangkaraya	Medan	Rp	10,300,000	Rp	5,412,000
280	Palangkaraya	Padang	Rp	8,760,000	Rp	4,642,000
281	Palangkaraya	Palembang	Rp	7,252,000	Rp	4,022,000
282	Palangkaraya	Pekanbaru	Rp	8,803,000	Rp	4,696,000
283	Palangkaraya	Semarang	Rp	7,252,000	Rp	3,947,000
284	Palangkaraya	Solo	Rp	7,252,000	Rp	4,086,000
285	Palangkaraya	Surabaya	Rp	8,696,000	Rp	4,385,000
286	Palembang	Balikpapan	Rp	9,894,000	Rp	5,220,000
287	Palembang	Makassar	Rp	9,466,000	Rp	4,781,000
288	Palembang	Pontianak	Rp	6,685,000	Rp	3,840,000
289	Palembang	Semarang	Rp	6,236,000	Rp	3,305,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET			
	ASAL	TUJUAN	BISNIS		EKONOMI	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
290	Palembang	Solo	Rp	6,236,000	Rp	3,444,000
291	Palembang	Surabaya	Rp	7,690,000	Rp	3,744,000
292	Palembang	Timika	Rp	15,210,000	Rp	8,076,000
293	Palu	Makassar	Rp	4,268,000	Rp	2,578,000
294	Palu	Poso	Rp	1,957,000	Rp	1,423,000
295	Palu	Sorong	Rp	6,878,000	Rp	3,883,000
296	Palu	Surabaya	Rp	6,878,000	Rp	3,883,000
297	Palu	Toli-Toli	Rp	2,941,000	Rp	1,915,000
298	Pangkal Pinang	Balikpapan	Rp	9,038,000	Rp	4,631,000
299	Pangkal Pinang	Banjarmasin	Rp	7,091,000	Rp	3,915,000
300	Pangkal Pinang	Batam	Rp	6,739,000	Rp	3,818,000
301	Pangkal Pinang	Yogyakarta	Rp	6,065,000	Rp	3,262,000
302	Pangkal Pinang	Makassar	Rp	9,060,000	Rp	4,663,000
303	Pangkal Pinang	Manado	Rp	12,097,000	Rp	5,808,000
304	Pangkal Pinang	Medan	Rp	8,888,000	Rp	4,653,000
305	Pangkal Pinang	Padang	Rp	7,337,000	Rp	3,883,000
306	Pangkal Pinang	Palembang	Rp	5,829,000	Rp	3,262,000
307	Pangkal Pinang	Pekanbaru	Rp	7,391,000	Rp	3,936,000
308	Pangkal Pinang	Pontianak	Rp	6,279,000	Rp	3,733,000
309	Pangkal Pinang	Samarinda	Rp	9,038,000	Rp	4,631,000
310	Pangkal Pinang	Semarang	Rp	5,829,000	Rp	3,187,000
311	Pangkal Pinang	Solo	Rp	5,829,000	Rp	3,326,000
312	Pangkal Pinang	Surabaya	Rp	7,284,000	Rp	3,626,000
313	Pekanbaru	Pontianak	Rp	8,247,000	Rp	4,514,000
314	Pekanbaru	Semarang	Rp	7,797,000	Rp	3,979,000
315	Pekanbaru	Solo	Rp	7,797,000	Rp	4,118,000
316	Pekanbaru	Surabaya	Rp	9,241,000	Rp	4,407,000
317	Pekanbaru	Timika	Rp	16,771,000	Rp	8,739,000
318	Pontianak	Makassar	Rp	9,915,000	Rp	5,241,000
319	Pontianak	Semarang	Rp	6,685,000	Rp	3,765,000
320	Pontianak	Solo	Rp	6,685,000	Rp	3,904,000
321	Pontianak	Surabaya	Rp	8,140,000	Rp	4,204,000
322	Pontianak	Timika	Rp	15,659,000	Rp	8,535,000
323	Samarinda	Banda Aceh	Rp	12,739,000	Rp	6,749,000
324	Samarinda	Batam	Rp	10,354,000	Rp	5,305,000
325	Samarinda	Denpasar	Rp	10,739,000	Rp	5,648,000
326	Samarinda	Jayapura	Rp	19,071,000	Rp	10,086,000
327	Samarinda	Yogyakarta	Rp	9,669,000	Rp	4,749,000
328	Samarinda	Makassar	Rp	12,664,000	Rp	6,150,000
329	Samarinda	Manado	Rp	18,702,000	Rp	7,295,000
330	Samarinda	Medan	Rp	12,493,000	Rp	6,140,000
331	Samarinda	Padang	Rp	10,942,000	Rp	5,369,000
332	Samarinda	Palembang	Rp	9,445,000	Rp	4,749,000
333	Samarinda	Pekanbaru	Rp	10,996,000	Rp	5,423,000
334	Samarinda	Semarang	Rp	9,445,000	Rp	4,674,000
335	Samarinda	Solo	Rp	9,445,000	Rp	4,813,000
336	Samarinda	Surabaya	Rp	10,889,000	Rp	5,113,000
337	Samarinda	Timika	Rp	18,408,000	Rp	9,445,000
338	Samarinda	Jakarta	Rp	7,412,000	Rp	3,797,000
339	Semarang	Makassar	Rp	9,466,000	Rp	4,706,000
340	Solo	Makassar	Rp	9,466,000	Rp	4,845,000
341	Surabaya	Denpasar	Rp	3,198,000	Rp	1,979,000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
342	Surabaya	Jayapura	Rp 12,675,000	Rp 7,231,000
343	Surabaya	Makassar	Rp 5,936,000	Rp 3,433,000
344	Surabaya	Timika	Rp 11,295,000	Rp 6,589,000

Catatan:

Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax, bagasi, dan biaya retribusi lainnya

B. SATUAN BIAYA TAKSI SEKALI JALAN (ONE WAY)

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang / Kali	Rp 123,000
2.	SUMATERA UTARA	Orang / Kali	Rp 232,000
3.	RIAU	Orang / Kali	Rp 94,000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / Kali	Rp 137,000
5.	J A M B I	Orang / Kali	Rp 147,000
6.	SUMATERA BARAT	Orang / Kali	Rp 190,000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / Kali	Rp 128,000
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	Rp 167,000
9.	BENGKULU	Orang / Kali	Rp 109,000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Kali	Rp 90,000
11.	BANTEN	Orang / Kali	Rp 446,000
12.	JAWA BARAT	Orang / Kali	Rp 166,000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang / Kali	Rp 256,000
14.	JAWA TENGAH	Orang / Kali	Rp 75,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	Rp 118,000
16.	JAWA TIMUR	Orang / Kali	Rp 194,000
17.	B A L I	Orang / Kali	Rp 159,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Kali	Rp 231,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Kali	Rp 108,000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	Rp 135,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	Rp 111,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	Rp 150,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Kali	Rp 450,000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	Rp 102,000
25.	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	Rp 138,000
26.	GORONTALO	Orang / Kali	Rp 240,000
27.	SULAWESI BARAT	Orang / Kali	Rp 313,000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	Rp 145,000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / Kali	Rp 165,000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Kali	Rp 171,000
31.	MALUKU	Orang / Kali	Rp 240,000
32.	MALUKU UTARA	Orang / Kali	Rp 215,000
33.	PAPUA	Orang / Kali	Rp 431,000
34.	PAPUA BARAT	Orang / Kali	Rp 182,000

Keterangan:
Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari termpat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan menuju termpat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.

C. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

1. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DI LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESSELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESSELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI HONORER
			TINGKAT. A	TINGKAT. B	TINGKAT. C	TINGKAT. D	TINGKAT. E
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp 4,420,000	Rp 3,526,000	Rp 1,294,000	Rp 556,000	Rp 556,000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4,960,000	Rp 1,518,000	Rp 1,100,000	Rp 530,000	Rp 530,000
3.	RIAU	OH	Rp 3,820,000	Rp 3,119,000	Rp 1,650,000	Rp 852,000	Rp 852,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 4,275,000	Rp 1,854,000	Rp 1,037,000	Rp 792,000	Rp 792,000
5.	J A M B I	OH	Rp 4,000,000	Rp 3,337,000	Rp 1,212,000	Rp 580,000	Rp 580,000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5,236,000	Rp 3,332,000	Rp 1,353,000	Rp 650,000	Rp 650,000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 5,850,000	Rp 3,083,000	Rp 1,571,000	Rp 861,000	Rp 861,000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 4,491,000	Rp 2,067,000	Rp 1,140,000	Rp 580,000	Rp 580,000
9.	BENGKULU	OH	Rp 2,071,000	Rp 1,628,000	Rp 1,546,000	Rp 630,000	Rp 630,000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3,827,000	Rp 2,838,000	Rp 1,957,000	Rp 622,000	Rp 622,000
11.	BANTEN	OH	Rp 5,725,000	Rp 2,373,000	Rp 1,000,000	Rp 718,000	Rp 718,000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 5,381,000	Rp 2,755,000	Rp 1,006,000	Rp 570,000	Rp 570,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 5,850,000	Rp 1,490,000	Rp 992,000	Rp 730,000	Rp 730,000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 4,242,000	Rp 1,480,000	Rp 954,000	Rp 600,000	Rp 600,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 5,017,000	Rp 2,695,000	Rp 1,384,000	Rp 845,000	Rp 845,000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 4,400,000	Rp 1,605,000	Rp 1,076,000	Rp 664,000	Rp 664,000
17.	B A L I	OH	Rp 4,890,000	Rp 1,946,000	Rp 990,000	Rp 910,000	Rp 910,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 3,500,000	Rp 2,648,000	Rp 1,418,000	Rp 580,000	Rp 580,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3,000,000	Rp 1,493,000	Rp 1,355,000	Rp 550,000	Rp 550,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2,654,000	Rp 1,538,000	Rp 1,125,000	Rp 538,000	Rp 538,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4,901,000	Rp 3,391,000	Rp 1,160,000	Rp 659,000	Rp 659,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4,797,000	Rp 3,316,000	Rp 1,500,000	Rp 540,000	Rp 540,000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4,000,000	Rp 2,188,000	Rp 1,507,000	Rp 804,000	Rp 804,000
24.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4,919,000	Rp 2,290,000	Rp 924,000	Rp 782,000	Rp 782,000
25.	GORONTALO	OH	Rp 4,168,000	Rp 2,549,000	Rp 1,431,000	Rp 764,000	Rp 764,000
26.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4,076,000	Rp 2,581,000	Rp 1,075,000	Rp 704,000	Rp 704,000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4,820,000	Rp 1,550,000	Rp 1,020,000	Rp 732,000	Rp 732,000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2,309,000	Rp 2,027,000	Rp 1,567,000	Rp 951,000	Rp 951,000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 2,475,000	Rp 2,059,000	Rp 1,297,000	Rp 786,000	Rp 786,000
30.	MALUKU	OH	Rp 3,467,000	Rp 3,240,000	Rp 1,048,000	Rp 667,000	Rp 667,000
31.	MALUKU UTARA	OH	Rp 3,440,000	Rp 3,175,000	Rp 1,073,000	Rp 600,000	Rp 600,000
32.	PAPUA	OH	Rp 3,859,000	Rp 3,318,000	Rp 2,521,000	Rp 829,000	Rp 829,000
33.	PAPUA BARAT	OH	Rp 3,872,000	Rp 3,212,000	Rp 2,056,000	Rp 718,000	Rp 718,000

2. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DI DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESSELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESSELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI HONORER
			TINGKAT. A	TINGKAT. B	TINGKAT. C	TINGKAT. D	TINGKAT. E
1.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	2,100,000	1,500,000	800,000	800,000

D. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

1. UANG HARIAN DI LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp 360,000	Rp 110,000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
3.	RIAU	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
5.	J A M B I	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
9.	BENGKULU	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410,000	Rp 120,000
11.	BANTEN	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530,000	Rp 160,000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420,000	Rp 130,000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 410,000	Rp 120,000
17.	B A L I	OH	Rp 480,000	Rp 140,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440,000	Rp 130,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360,000	Rp 110,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
24.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
25.	GORONTALO	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
26.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410,000	Rp 120,000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370,000	Rp 110,000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
30.	MALUKU	OH	Rp 380,000	Rp 110,000
31.	MALUKU UTARA	OH	Rp 430,000	Rp 130,000
32.	PAPUA	OH	Rp 580,000	Rp 170,000
33.	PAPUA BARAT	OH	Rp 480,000	Rp 140,000

2. UANG HARIAN DI DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	DIKLAT
1.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430,000	Rp 130,000

E. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250,000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 200,000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150,000

F. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I DAN II

1. PAKET HALFDAY, FULLDAY DAN FULLBOARD

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp 346,000	Rp 403,000	Rp 1,075,000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp 276,000	Rp 365,000	Rp 800,000
3.	RIAU	OP	Rp 225,000	Rp 335,000	Rp 690,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 230,000	Rp 360,000	Rp 790,000
5.	J A M B I	OP	Rp 271,000	Rp 364,000	Rp 1,008,000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp 245,000	Rp 310,000	Rp 987,000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 268,000	Rp 384,000	Rp 860,000
8.	LAMPUNG	OP	Rp 261,000	Rp 373,000	Rp 836,000
9.	BENGKULU	OP	Rp 250,000	Rp 373,000	Rp 973,000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 305,000	Rp 400,000	Rp 925,000
11.	BANTEN	OP	Rp 395,000	Rp 468,000	Rp 919,000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp 426,000	Rp 530,000	Rp 1,110,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 433,000	Rp 510,000	Rp 1,216,000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp 232,000	Rp 309,000	Rp 749,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 250,000	Rp 405,000	Rp 963,000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp 357,000	Rp 406,000	Rp 1,784,000
17.	B A L I	OP	Rp 375,000	Rp 490,000	Rp 1,500,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 368,000	Rp 530,000	Rp 1,001,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 308,000	Rp 388,000	Rp 1,088,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 337,000	Rp 400,000	Rp 810,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 317,000	Rp 487,000	Rp 1,267,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 264,000	Rp 360,000	Rp 930,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 298,000	Rp 478,000	Rp 1,050,000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 274,000	Rp 350,000	Rp 848,000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp 273,000	Rp 350,000	Rp 870,000
26.	GORONTALO	OP	Rp 215,000	Rp 393,000	Rp 1,338,000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp 264,000	Rp 382,000	Rp 856,000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 290,000	Rp 410,000	Rp 1,574,000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 283,000	Rp 389,000	Rp 1,013,000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 237,000	Rp 350,000	Rp 800,000
31.	MALUKU	OP	Rp 306,000	Rp 454,000	Rp 1,300,000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp 316,000	Rp 498,000	Rp 850,000
33.	PAPUA	OP	Rp 318,000	Rp 536,000	Rp 1,863,000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp 292,000	Rp 526,000	Rp 1,752,000

Keterangan:

1. Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif.
2. Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.

2. PAKET RESIDENCE

NO.	PROVINSI	SATUAN	RESIDENCE	
			ESSELON I	ESSELON II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OP	Rp 749,000	Rp 630,000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp 641,000	Rp 453,000
3.	RIAU	OP	Rp 560,000	Rp 430,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 590,000	Rp 500,000
5.	J A M B I	OP	Rp 635,000	Rp 516,000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp 555,000	Rp 413,000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 652,000	Rp 511,000
8.	LAMPUNG	OP	Rp 634,000	Rp 486,000
9.	BENGKULU	OP	Rp 623,000	Rp 498,000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 705,000	Rp 684,000
11.	BANTEN	OP	Rp 863,000	Rp 629,000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp 956,000	Rp 729,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 943,000	Rp 787,000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp 541,000	Rp 454,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 655,000	Rp 520,000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp 763,000	Rp 733,000
17.	B A L I	OP	Rp 865,000	Rp 771,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 898,000	Rp 700,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 696,000	Rp 648,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 737,000	Rp 581,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 804,000	Rp 582,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 624,000	Rp 489,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 639,000	Rp 509,000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 624,000	Rp 509,000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp 623,000	Rp 455,000
26.	GORONTALO	OP	Rp 608,000	Rp 425,000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp 646,000	Rp 558,000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 700,000	Rp 526,000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 672,000	Rp 619,000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 587,000	Rp 490,000
31.	MALUKU	OP	Rp 760,000	Rp 599,000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp 814,000	Rp 523,000
33.	PAPUA	OP	Rp 854,000	Rp 771,000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp 818,000	Rp 705,000

Keterangan:

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

G. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR (PEJABAT ESSELON III KEBAWAH)

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OP	Rp 300,000	Rp 330,000	Rp 772,000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp 178,000	Rp 275,000	Rp 746,000
3.	RIAU	OP	Rp 185,000	Rp 245,000	Rp 591,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 227,000	Rp 273,000	Rp 625,000
5.	J A M B I	OP	Rp 215,000	Rp 301,000	Rp 840,000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp 173,000	Rp 240,000	Rp 663,000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 218,000	Rp 293,000	Rp 745,000
8.	LAMPUNG	OP	Rp 216,000	Rp 270,000	Rp 640,000
9.	BENGKULU	OP	Rp 214,000	Rp 284,000	Rp 912,000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 299,000	Rp 385,000	Rp 804,000
11.	BANTEN	OP	Rp 275,000	Rp 354,000	Rp 837,000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp 331,000	Rp 398,000	Rp 822,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 354,000	Rp 433,000	Rp 1,197,000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp 191,000	Rp 263,000	Rp 675,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 210,000	Rp 310,000	Rp 750,000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp 338,000	Rp 395,000	Rp 1,352,000
17.	B A L I	OP	Rp 330,000	Rp 441,000	Rp 1,182,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 280,000	Rp 420,000	Rp 764,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 271,000	Rp 377,000	Rp 825,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 250,000	Rp 331,000	Rp 664,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 242,000	Rp 340,000	Rp 1,031,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 194,000	Rp 295,000	Rp 734,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 208,000	Rp 302,000	Rp 900,000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 207,000	Rp 302,000	Rp 750,000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp 185,000	Rp 270,000	Rp 737,000
26.	GORONTALO	OP	Rp 175,000	Rp 250,000	Rp 1,299,000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp 235,000	Rp 323,000	Rp 792,000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 206,000	Rp 320,000	Rp 1,127,000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 234,000	Rp 385,000	Rp 738,000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 195,000	Rp 295,000	Rp 688,000
31.	MALUKU	OP	Rp 253,000	Rp 346,000	Rp 724,000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp 169,000	Rp 354,000	Rp 669,000
33.	PAPUA	OP	Rp 293,000	Rp 478,000	Rp 990,000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp 284,000	Rp 421,000	Rp 1,120,000

Keterangan:

1. Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif.
2. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
3. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini.

H. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp 120,000	Rp 120,000	Rp 85,000	Rp 120,000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
3.	RIAU	OH	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp 85,000	Rp 130,000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
5.	J A M B I	OH	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp 120,000	Rp 120,000	Rp 85,000	Rp 120,000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 120,000	Rp 120,000	Rp 85,000	Rp 120,000
8.	LAMPUNG	OH	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
9.	BENGKULU	OH	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
11.	BANTEN	OH	Rp 120,000	Rp 120,000	Rp 85,000	Rp 120,000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 105,000	Rp 150,000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 180,000	Rp 180,000	Rp 130,000	Rp 180,000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 140,000	Rp 140,000	Rp 100,000	Rp 140,000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp 140,000	Rp 140,000	Rp 100,000	Rp 140,000
17.	B A L I	OH	Rp 160,000	Rp 160,000	Rp 115,000	Rp 160,000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 105,000	Rp 150,000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 140,000	Rp 140,000	Rp 100,000	Rp 140,000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 120,000	Rp 120,000	Rp 85,000	Rp 120,000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 105,000	Rp 150,000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 105,000	Rp 150,000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
26.	GORONTALO	OH	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp 120,000	Rp 120,000	Rp 85,000	Rp 120,000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 105,000	Rp 150,000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
31.	MALUKU	OH	Rp 120,000	Rp 120,000	Rp 85,000	Rp 120,000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp 130,000	Rp 130,000	Rp 95,000	Rp 130,000
33.	PAPUA	OH	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 140,000	Rp 200,000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp 160,000	Rp 160,000	Rp 115,000	Rp 160,000

Keterangan:
Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota dan kegiatan fullday / half day di luar kota/ di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

I. BIAYA TRANSPORTASI DARAT DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	KABUPATEN/KOTA	TRANSPORTASI (PP)	CARTER (ONE WAY)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SANGATTA - BERAU	1,650,000	3,500,000
2	SANGATTA - MAHAKAM HULU	2,450,000	6,000,000
3	SANGATTA - KUTAI BARAT	1,150,000	4,400,000
4	SANGATTA - KUTAI KARTANEGARA	500,000	1,600,000
5	SANGATTA - BONTANG	300,000	650,000
6	SANGATTA - BALIKPAPAN	750,000	1,700,000
7	SANGATTA - SAMARINDA	500,000	1,500,000
8	SANGATTA - PASER	1,000,000	4,200,000
9	SANGATTA - PENAJAM PASER UTARA	850,000	3,300,000

Catatan :

1. Biaya Transportasi dalam wilayah Kalimantan Timur digunakan bilamana pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda transportasi darat dan air/laut.
2. Biaya bantuan BBM perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas disesuaikan dengan tanda bukti pembelian BBM dari SPBU atau bukti pembelian yang sah. Apabila tidak mendapatkan bukti yang sah maka melampirkan surat pernyataan rill.

J. PAKET BIAYA TRANSPORTASI UDARA DALAM WILAYAH KALIMANTAN

NO.	JALUR TRANSPORTASI	TINGKAT A (Kelas Bisnis)	TINGKAT B, C, D DAN E (Kelas Ekonomi)
		Pergi - Pulang (PP)	Pergi - Pulang (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SANGATTA - BERAU	3,731,000	2,906,000
2	SANGATTA - BALIKPAPAN	2,300,000	2,300,000

Catatan :

Paket Biaya Transportasi dalam wilayah Kalimantan Timur digunakan bilamana pelaksana perjalanan dinas menggunakan moda trasportasi udara.

K. SEWA KENDARAAN DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SUV Jip 2500cc 4x4	Unit / Hari	2,750,000
2	SUV Dobel Kabin 2500cc 4x4	Unit / Hari	1,650,000
3	Inova/Terios	Unit / Hari	800,000
4	Avanza	Unit / Hari	500,000

Catatan :

1. Biaya sewa kendaraan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur digunakan hanya untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan kegiatan insidentil yang digunakan untuk kebutuhan sifatnya tidak terus menerus.
2. Biaya bantuan BBM perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan sewa disesuaikan dengan tanda bukti pembelian BBM dari SPBU atau bukti pembelian yang sah. Apabila tidak mendapatkan bukti yang sah maka melampirkan surat pernyataan rill.

L. BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO	DARI	TUJUAN	SATUAN	BESARAN	
1	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp	300,000
2	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp	300,000
3	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp	284,000
4	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp	284,000
5	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp	428,000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp	286,000
7	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp	310,000
8	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp	286,000
9	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp	275,000
10	Jakarta	Bandung (Reguler)	Orang/Kali	Rp	500,000
11	Jakarta	Bandung (Carter)	Orang/Kali	Rp	1,000,000

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 101 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

A. BIAYA TIKET PESAWAT LUAR NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	ASAL	NEGARA TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Chicago)	Rp 99,919,500	Rp 53,099,000
2	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Houston)	Rp 94,061,500	Rp 52,069,500
3	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Los Angeles)	Rp 85,912,500	Rp 47,009,000
4	JAKARTA	AMERIKA UTARA (New York)	Rp 89,595,500	Rp 55,665,500
5	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Ottawa)	Rp 100,398,000	Rp 59,203,500
6	JAKARTA	AMERIKA UTARA (San Fransisco)	Rp 103,501,000	Rp 43,311,500
7	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Toronto)	Rp 124,178,000	Rp 46,414,500
8	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Vancouver)	Rp 108,141,000	Rp 47,516,500
9	JAKARTA	AMERIKA UTARA (Washington)	Rp 125,454,000	Rp 56,985,000
10	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Bogota)	Rp 136,677,000	Rp 111,838,500
11	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Brasilia)	Rp 167,011,000	Rp 86,565,000
12	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Boenos Aires)	Rp 221,850,000	Rp 150,800,000
13	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Caracas)	Rp 200,636,500	Rp 98,962,500
14	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Paramaribo)	Rp 137,663,000	Rp 106,618,500
15	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Santiago de Chile)	Rp 225,315,500	Rp 129,050,000
16	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Quito)	Rp 235,900,500	Rp 175,841,500
17	JAKARTA	AMERIKA SELATAN (Lima)	Rp 119,813,500	Rp 73,051,000
18	JAKARTA	AMERIKA TENGAH (Meksiko)	Rp 113,549,500	Rp 57,507,000
19	JAKARTA	AMERIKA TENGAH (Havana)	Rp 162,733,500	Rp 106,357,500
20	JAKARTA	AMERIKA TENGAH (Panama)	Rp 134,937,000	Rp 89,827,500
21	JAKARTA	EROPA BARAT (Vienna)	Rp 60,566,500	Rp 48,676,500
22	JAKARTA	EROPA BARAT (Brussel)	Rp 86,913,000	Rp 56,115,000
23	JAKARTA	EROPA BARAT (Marseille)	Rp 73,573,000	Rp 51,344,500
24	JAKARTA	EROPA BARAT (Paris)	Rp 88,232,500	Rp 48,299,500
25	JAKARTA	EROPA BARAT (Berlin)	Rp 88,827,000	Rp 57,405,500
26	JAKARTA	EROPA BARAT (Bern)	Rp 98,281,000	Rp 63,147,500
27	JAKARTA	EROPA BARAT (Bonn)	Rp 72,833,500	Rp 54,418,500
28	JAKARTA	EROPA BARAT (Hamburg)	Rp 110,765,500	Rp 59,566,000
29	JAKARTA	EROPA BARAT (Geneva)	Rp 77,865,000	Rp 62,828,500
30	JAKARTA	EROPA BARAT (Amsterdam)	Rp 85,521,000	Rp 48,299,500
31	JAKARTA	EROPA BARAT (Den Haag)	Rp 85,521,000	Rp 48,299,500
32	JAKARTA	EROPA BARAT (Frankfurt)	Rp 58,536,500	Rp 15,442,500
33	JAKARTA	EROPA UTARA (Kopenhagen)	Rp 71,340,000	Rp 54,085,000
34	JAKARTA	EROPA UTARA (Helsinki)	Rp 85,999,500	Rp 53,374,500
35	JAKARTA	EROPA UTARA (Stockholm)	Rp 79,837,000	Rp 49,778,500
36	JAKARTA	EROPA UTARA (London)	Rp 105,748,500	Rp 60,218,500
37	JAKARTA	EROPA UTARA (Oslo)	Rp 69,208,500	Rp 58,710,500
38	JAKARTA	EROPA SELATAN (Sarajevo)	Rp 103,370,500	Rp 87,478,500
39	JAKARTA	EROPA SELATAN (Zagreb)	Rp 147,566,500	Rp 75,139,000
40	JAKARTA	EROPA SELATAN (Athens)	Rp 134,212,000	Rp 116,594,500

NO	ASAL	NEGARA TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
41	JAKARTA	EROPA SELATAN (Lisbon)	Rp 68,817,000	Rp 49,053,500
42	JAKARTA	EROPA SELATAN (Madrid)	Rp 69,121,500	Rp 52,649,500
43	JAKARTA	EROPA SELATAN (Roma)	Rp 87,000,000	Rp 65,250,000
44	JAKARTA	EROPA SELATAN (Beograd)	Rp 92,858,000	Rp 80,678,000
45	JAKARTA	EROPA SELATAN (Vatikan)	Rp 87,000,000	Rp 65,250,000
46	JAKARTA	EROPA TIMUR (Bratislava)	Rp 64,133,500	Rp 55,709,000
47	JAKARTA	EROPA TIMUR (Bucharest)	Rp 72,239,000	Rp 59,638,500
48	JAKARTA	EROPA TIMUR (Kiev)	Rp 87,420,500	Rp 75,298,500
49	JAKARTA	EROPA TIMUR (Moskow)	Rp 104,487,000	Rp 74,573,500
50	JAKARTA	EROPA TIMUR (Praha)	Rp 171,796,000	Rp 97,846,000
51	JAKARTA	EROPA TIMUR (Sofia)	Rp 92,017,000	Rp 52,374,000
52	JAKARTA	EROPA TIMUR (Warsawa)	Rp 73,254,000	Rp 49,981,500
53	JAKARTA	EROPA TIMUR (Budapest)	Rp 86,695,500	Rp 31,711,500
54	JAKARTA	AFRIKA BARAT (Dakkar)	Rp 142,796,000	Rp 124,047,500
55	JAKARTA	AFRIKA BARAT (Abuja)	Rp 113,796,000	Rp 98,861,000
56	JAKARTA	AFRIKA TIMUR (Addis Ababa)	Rp 84,216,000	Rp 80,504,000
57	JAKARTA	AFRIKA TIMUR (Nairobi)	Rp 115,507,000	Rp 88,174,500
58	JAKARTA	AFRIKA TIMUR (Antananarivo)	Rp 130,500,000	Rp 120,089,000
59	JAKARTA	AFRIKA TIMUR (Dar Es Salaam)	Rp 95,685,500	Rp 83,128,500
60	JAKARTA	AFRIKA TIMUR (Harare)	Rp 153,700,000	Rp 83,331,500
61	JAKARTA	AFRIKA SELATAN (Windhoek)	Rp 170,723,000	Rp 108,895,000
62	JAKARTA	AFRIKA SELATAN (Cape Town)	Rp 140,693,500	Rp 122,220,500
63	JAKARTA	AFRIKA SELATAN (Johannesburg)	Rp 142,129,000	Rp 104,632,000
64	JAKARTA	AFRIKA SELATAN (Maputo)	Rp 123,598,000	Rp 90,987,500
65	JAKARTA	AFRIKA SELATAN (Pretoria)	Rp 142,129,000	Rp 104,632,000
66	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Algiers)	Rp 95,598,500	Rp 82,795,000
67	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Kairo)	Rp 103,269,000	Rp 65,003,500
68	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Khartoum)	Rp 65,351,500	Rp 56,767,500
69	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Rabbat)	Rp 111,954,500	Rp 82,142,500
70	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Tripoli)	Rp 82,737,000	Rp 72,137,500
71	JAKARTA	AFRIKA UTARA (Tunisia)	Rp 72,761,000	Rp 52,475,500
72	JAKARTA	ASIA BARAT (Manama)	Rp 89,233,000	Rp 69,991,500
73	JAKARTA	ASIA BARAT (Baghdad)	Rp 60,146,000	Rp 51,402,500
74	JAKARTA	ASIA BARAT (Amman)	Rp 93,249,500	Rp 51,402,500
75	JAKARTA	ASIA BARAT (Kuwait)	Rp 61,958,500	Rp 45,095,000
76	JAKARTA	ASIA BARAT (Beirut)	Rp 65,105,000	Rp 54,085,000
77	JAKARTA	ASIA BARAT (Doha)	Rp 52,765,500	Rp 39,802,500
78	JAKARTA	ASIA BARAT (Damaskus)	Rp 78,155,000	Rp 48,212,500
79	JAKARTA	ASIA BARAT (Ankara)	Rp 96,323,500	Rp 51,924,500
80	JAKARTA	ASIA BARAT (Abu Dhabi)	Rp 72,152,000	Rp 39,541,500
81	JAKARTA	ASIA BARAT (Sanaa)	Rp 85,231,000	Rp 53,345,500
82	JAKARTA	ASIA BARAT (Jeddah)	Rp 54,882,500	Rp 48,154,500
83	JAKARTA	ASIA BARAT (Muscat)	Rp 74,762,000	Rp 54,041,500
84	JAKARTA	ASIA BARAT (Riyadh)	Rp 50,895,000	Rp 43,500,000
85	JAKARTA	ASIA BARAT (Istanbul)	Rp 64,307,500	Rp 35,771,500
86	JAKARTA	ASIA BARAT (Dubai)	Rp 61,001,500	Rp 27,840,000
87	JAKARTA	ASIA TENGAH (Tashkent)	Rp 122,568,500	Rp 106,473,500
88	JAKARTA	ASIA TENGAH (Astana)	Rp 175,290,500	Rp 129,949,000
89	JAKARTA	ASIA TENGAH (Baku)	Rp 124,062,000	Rp 33,074,500
90	JAKARTA	ASIA TIMUR (Beijing)	Rp 31,030,000	Rp 23,533,500
91	JAKARTA	ASIA TIMUR (Hongkong)	Rp 38,178,500	Rp 18,226,500
92	JAKARTA	ASIA TIMUR (Osaka)	Rp 38,947,000	Rp 27,028,000

NO	ASAL	NEGARA TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
			BISNIS	EKONOMI
93	JAKARTA	ASIA TIMUR (Tokyo)	Rp 38,787,500	Rp 26,607,500
94	JAKARTA	ASIA TIMUR (Pyongyang)	Rp 32,190,000	Rp 24,070,000
95	JAKARTA	ASIA TIMUR (Seoul)	Rp 43,007,000	Rp 25,186,500
96	JAKARTA	ASIA TIMUR (Shanghai)	Rp 39,860,500	Rp 18,908,000
97	JAKARTA	ASIA TIMUR (Guangzhou)	Rp 39,860,500	Rp 18,908,000
98	JAKARTA	ASIA SELATAN (Kabul)	Rp 56,622,500	Rp 46,516,000
99	JAKARTA	ASIA SELATAN (Teheran)	Rp 66,700,000	Rp 46,400,000
100	JAKARTA	ASIA SELATAN (Kolombo)	Rp 37,149,000	Rp 23,606,000
101	JAKARTA	ASIA SELATAN (Dhaka)	Rp 35,046,500	Rp 15,834,000
102	JAKARTA	ASIA SELATAN (Islamabad)	Rp 48,328,500	Rp 36,264,500
103	JAKARTA	ASIA SELATAN (Karachi)	Rp 52,678,500	Rp 33,654,500
104	JAKARTA	ASIA SELATAN (New Delhi)	Rp 36,250,000	Rp 21,750,000
105	JAKARTA	ASIA SELATAN (Mumbai)	Rp 35,046,500	Rp 15,834,000
106	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Bandar Seri Bagawan	Rp 16,631,500	Rp 13,325,500
107	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Bangkok)	Rp 16,747,500	Rp 11,933,500
108	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Davao City)	Rp 37,091,000	Rp 23,794,500
109	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Dilli)	Rp 7,119,500	Rp 5,075,000
110	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Hanoi)	Rp 26,578,500	Rp 24,012,000
111	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Ho Chi Minh)	Rp 21,793,500	Rp 17,907,500
112	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Johor Bahru)	Rp 13,209,500	Rp 7,612,500
113	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Kota Kinabalu)	Rp 20,691,500	Rp 10,063,000
114	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Kuala Lumpur)	Rp 9,555,500	Rp 8,482,500
115	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Kuching)	Rp 27,550,000	Rp 5,278,000
116	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Manila)	Rp 23,403,000	Rp 16,675,000
117	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Penang)	Rp 11,107,000	Rp 7,902,500
118	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Phnom Penh)	Rp 28,724,500	Rp 23,591,500
119	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Singapura)	Rp 9,758,500	Rp 5,843,500
120	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Vientiane)	Rp 29,362,500	Rp 20,590,000
121	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Yangon)	Rp 17,574,000	Rp 15,268,500
122	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Tawau)	Rp 20,691,500	Rp 10,063,000
123	JAKARTA	ASIA TENGGARA (Songkhla)	Rp 16,747,500	Rp 11,933,500
124	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Canberra)	Rp 91,408,000	Rp 36,250,000
125	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Darwin)	Rp 71,050,000	Rp 57,478,000
126	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Melbourne)	Rp 55,303,000	Rp 41,441,000
127	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Noumea)	Rp 85,796,500	Rp 27,782,000
128	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Perth)	Rp 26,114,500	Rp 22,112,500
129	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Port Moresby)	Rp 200,607,500	Rp 119,654,000
130	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Suva)	Rp 64,684,500	Rp 38,700,500
131	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Sydney)	Rp 61,436,500	Rp 37,076,500
132	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Vanimo)	Rp 39,730,000	Rp 34,510,000
133	JAKARTA	ASIA PASIFIK (Wellington)	Rp 142,535,000	Rp 59,740,000

Keterangan:

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya.

B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO.	NEGARA	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESSELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESSELON IV/ GOLONGAN III,II,I DAN HONORER
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D DAN E
1	Amerika Serikat	Rp 9,555,500	Rp 8,163,500	Rp 7,322,500	Rp 6,481,500
2	Kanada	Rp 8,004,000	Rp 6,771,500	Rp 6,032,000	Rp 5,292,500
3	Argentina	Rp 7,743,000	Rp 5,829,000	Rp 5,089,500	Rp 5,060,500
4	Venezuela	Rp 8,076,500	Rp 5,626,000	Rp 4,988,000	Rp 4,973,500
5	Brasil	Rp 6,322,000	Rp 5,742,000	Rp 5,481,000	Rp 5,089,500
6	Chili	Rp 6,293,000	Rp 5,365,000	Rp 4,814,000	Rp 4,263,000
7	Kolombia	Rp 6,757,000	Rp 5,988,500	Rp 5,872,500	Rp 5,292,500
8	Peru	Rp 6,655,500	Rp 5,104,000	Rp 4,640,000	Rp 4,060,000
9	Suriname	Rp 5,771,000	Rp 5,278,000	Rp 3,886,000	Rp 3,886,000
10	Ekuador	Rp 6,032,000	Rp 5,147,500	Rp 4,625,500	Rp 4,103,500
11	Meksiko	Rp 8,018,500	Rp 6,786,000	Rp 6,046,500	Rp 5,307,000
12	Kuba	Rp 6,568,500	Rp 5,582,500	Rp 5,002,500	Rp 4,422,500
13	Panama	Rp 6,061,000	Rp 5,176,500	Rp 4,640,000	Rp 4,103,500
14	Austria	Rp 7,308,000	Rp 6,568,500	Rp 5,031,500	Rp 4,596,500
15	Belgia	Rp 7,801,000	Rp 6,612,000	Rp 5,887,000	Rp 5,176,500
16	Perancis	Rp 7,946,000	Rp 6,728,000	Rp 5,988,500	Rp 5,524,500
17	Jerman	Rp 7,032,500	Rp 6,017,500	Rp 5,336,000	Rp 4,698,000
18	Belanda	Rp 7,032,500	Rp 6,032,000	Rp 5,336,000	Rp 4,698,000
19	Swiss	Rp 9,222,000	Rp 8,265,000	Rp 6,438,000	Rp 5,814,500
20	Denmark	Rp 8,250,500	Rp 7,119,500	Rp 6,206,000	Rp 5,437,500
21	Finlandia	Rp 7,554,500	Rp 6,409,000	Rp 5,713,000	Rp 5,017,000
22	Norwegia	Rp 9,004,500	Rp 8,105,500	Rp 5,640,500	Rp 5,597,000
23	Swedia	Rp 8,917,500	Rp 7,525,500	Rp 6,684,500	Rp 5,843,500
24	Inggris	Rp 11,484,000	Rp 11,223,000	Rp 8,453,500	Rp 8,439,000
25	Bosnia dan Herzegovina	Rp 6,612,000	Rp 6,090,000	Rp 4,843,000	Rp 4,828,500
26	Kroasia	Rp 8,047,500	Rp 7,337,000	Rp 5,887,000	Rp 5,872,500
27	Spanyol	Rp 6,626,500	Rp 5,988,500	Rp 4,857,500	Rp 4,292,000
28	Yunani	Rp 6,191,500	Rp 5,495,500	Rp 4,741,500	Rp 4,190,500
29	Italia	Rp 10,179,000	Rp 9,236,500	Rp 6,467,000	Rp 6,191,500
30	Portugal	Rp 6,162,500	Rp 5,539,000	Rp 5,539,000	Rp 3,958,500
31	Serbia	Rp 6,046,500	Rp 5,437,500	Rp 4,727,000	Rp 4,176,000
32	Bulgaria	Rp 5,887,000	Rp 5,321,500	Rp 4,640,000	Rp 4,118,000
33	Ceko	Rp 8,961,000	Rp 7,627,000	Rp 6,481,500	Rp 5,321,500
34	Hongaria	Rp 7,032,500	Rp 6,351,000	Rp 5,655,000	Rp 5,002,500
35	Polandia	Rp 6,931,000	Rp 6,017,500	Rp 5,263,500	Rp 4,640,000
36	Rumania	Rp 6,032,000	Rp 5,524,500	Rp 4,538,500	Rp 4,016,500
37	Rusia	Rp 8,062,000	Rp 7,424,000	Rp 5,901,500	Rp 5,887,000
38	Slovakia	Rp 6,336,500	Rp 5,713,000	Rp 4,944,500	Rp 4,393,500
39	Ukraina	Rp 7,032,500	Rp 6,322,000	Rp 5,437,500	Rp 4,799,500
40	Nigeria	Rp 6,786,000	Rp 6,206,000	Rp 5,872,500	Rp 5,365,000
41	Senegal	Rp 6,684,500	Rp 5,698,500	Rp 4,872,000	Rp 4,509,500
42	Etiopia	Rp 6,090,000	Rp 5,423,000	Rp 4,785,000	Rp 4,132,500
43	Kenya	Rp 6,626,500	Rp 6,061,000	Rp 4,988,000	Rp 4,466,000

NO.	NEGARA	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESSELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESSELON IV/ GOLONGAN III,II,I DAN HONORER
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D DAN E
44	Madagaskar	Rp 5,742,000	Rp 5,307,000	Rp 4,147,000	Rp 3,654,000
45	Tanzania	Rp 6,641,000	Rp 5,597,000	Rp 5,176,500	Rp 4,393,500
46	Zimbabwe	Rp 6,235,000	Rp 5,800,000	Rp 4,785,000	Rp 4,582,000
47	Mozambik	Rp 6,844,000	Rp 6,322,000	Rp 5,162,000	Rp 4,625,500
48	Namibia	Rp 6,409,000	Rp 5,452,000	Rp 4,524,000	Rp 3,900,500
49	Afrika Selatan	Rp 6,380,000	Rp 5,800,000	Rp 5,263,500	Rp 4,596,500
50	Aljazair	Rp 5,713,000	Rp 5,234,500	Rp 4,625,500	Rp 4,205,000
51	Mesir	Rp 6,974,500	Rp 6,177,000	Rp 5,872,500	Rp 5,234,500
52	Maroko	Rp 5,843,500	Rp 5,118,500	Rp 4,495,000	Rp 3,944,000
53	Tunisia	Rp 5,495,500	Rp 4,350,000	Rp 3,857,000	Rp 3,436,500
54	Sudan	Rp 6,423,500	Rp 5,916,000	Rp 5,191,000	Rp 4,060,000
55	Libya	Rp 6,612,000	Rp 5,698,500	Rp 4,930,000	Rp 4,640,000
56	Azerbaijan	Rp 7,221,000	Rp 6,655,500	Rp 5,292,500	Rp 5,278,000
57	Bahrain	Rp 6,887,500	Rp 6,148,000	Rp 4,118,000	Rp 3,146,500
58	Irak	Rp 6,684,500	Rp 5,684,000	Rp 5,089,500	Rp 4,495,000
59	Yordania	Rp 7,308,000	Rp 6,206,000	Rp 5,539,000	Rp 4,872,000
60	Kuwait	Rp 8,424,500	Rp 7,119,500	Rp 6,336,500	Rp 5,553,500
61	Libanon	Rp 6,626,500	Rp 5,640,500	Rp 5,046,000	Rp 4,451,500
62	Qatar	Rp 7,337,000	Rp 6,496,000	Rp 5,060,500	Rp 4,205,000
63	Suriah	Rp 5,191,000	Rp 4,364,500	Rp 3,944,000	Rp 3,523,500
64	Turki	Rp 6,612,000	Rp 5,278,000	Rp 4,509,500	Rp 4,002,000
65	Uni Emirat Arab	Rp 8,613,000	Rp 7,279,000	Rp 6,467,000	Rp 5,669,500
66	Yaman	Rp 5,118,500	Rp 3,610,500	Rp 3,277,000	Rp 2,958,000
67	Saudi Arabia	Rp 6,786,000	Rp 5,771,000	Rp 5,162,000	Rp 4,553,000
68	Kesultanan Oman	Rp 7,482,000	Rp 6,336,500	Rp 5,655,000	Rp 4,973,500
69	Republik Rakyat Tiongkok	Rp 5,959,500	Rp 5,089,500	Rp 4,567,500	Rp 4,045,500
70	Hongkong	Rp 8,714,500	Rp 7,351,500	Rp 6,539,500	Rp 5,727,500
71	Jepang	Rp 7,525,500	Rp 6,206,000	Rp 5,539,000	Rp 4,872,000
72	Korea Selatan	Rp 7,467,500	Rp 6,771,500	Rp 6,162,500	Rp 6,104,500
73	Korea Utara	Rp 7,163,000	Rp 4,654,500	Rp 4,350,000	Rp 4,031,000
74	Afganistan	Rp 5,582,500	Rp 3,799,000	Rp 3,451,000	Rp 3,103,000
75	Bangladesh	Rp 4,915,500	Rp 4,538,500	Rp 3,523,500	Rp 3,451,000
76	India	Rp 6,119,000	Rp 4,770,500	Rp 4,741,500	Rp 4,712,500
77	Pakistan	Rp 4,973,500	Rp 4,016,500	Rp 3,639,500	Rp 3,262,500
78	Srilanka	Rp 5,626,000	Rp 4,814,000	Rp 4,335,500	Rp 3,857,000
79	Iran	Rp 6,104,500	Rp 4,814,000	Rp 4,335,500	Rp 3,857,000
80	Uzbekistan	Rp 5,684,000	Rp 5,104,000	Rp 4,161,500	Rp 3,683,000
81	Kazakhstan	Rp 6,612,000	Rp 6,090,000	Rp 4,843,000	Rp 4,828,500
82	Filipina	Rp 5,974,000	Rp 5,321,500	Rp 3,857,000	Rp 3,277,000
83	Singapura	Rp 8,917,500	Rp 7,525,500	Rp 6,684,500	Rp 5,843,500
84	Malaysia	Rp 5,713,000	Rp 4,408,000	Rp 3,973,000	Rp 3,538,000
85	Thailand	Rp 5,684,000	Rp 4,785,000	Rp 4,306,500	Rp 3,828,000
86	Myanmar	Rp 5,336,000	Rp 3,625,000	Rp 3,045,000	Rp 2,842,000
87	Laos	Rp 5,510,000	Rp 4,016,500	Rp 3,639,500	Rp 3,262,500
88	Vietnam	Rp 5,553,500	Rp 4,234,000	Rp 3,538,000	Rp 3,175,500
89	Brunei Darussalam	Rp 5,423,000	Rp 4,031,000	Rp 3,654,000	Rp 3,277,000

NO.	NEGARA	KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESSELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESSELON IV/ GOLONGAN III,II,I DAN HONORER
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D DAN E
90	Kamboja	Rp 4,292,000	Rp 3,233,500	Rp 2,914,500	Rp 2,842,000
91	Timor Leste	Rp 5,684,000	Rp 5,133,000	Rp 3,422,000	Rp 3,074,000
92	Australia	Rp 9,222,000	Rp 8,482,500	Rp 6,148,000	Rp 5,698,500
93	Selandia Baru	Rp 7,902,500	Rp 6,684,500	Rp 5,959,500	Rp 5,234,500
94	Kaledonia Baru	Rp 6,162,500	Rp 5,611,500	Rp 4,335,500	Rp 3,857,000
95	Papua Nugini	Rp 7,540,000	Rp 6,902,000	Rp 6,220,500	Rp 5,452,000
96	Fiji	Rp 6,191,500	Rp 5,292,500	Rp 4,741,500	Rp 4,190,500

Catatan:

1. Uang Harian dalam kurs Rupiah (1 USD = 14.500 Rupiah)
2. Uang Harian digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 101 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

A. BIAYA TRANSPORTASI DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO	KECAMATAN	BANTUAN SURVEY (PAKET)	BIAYA TRANSPORT (ORANG/PP)	BIAYA CARTER KENDARAAN (PP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SANGATTA - SANGATTA UTARA	78,000	150,000	337,500
2	SANGATTA - SANGATTA SELATAN	156,250	225,000	337,500
3	SANGATTA - TELUK PANDAN	156,000	250,000	475,000
4	SANGATTA - RANTAU PULUNG	234,000	270,000	945,000
5	SANGATTA - BENGALON	234,000	270,000	945,000
6	SANGATTA - KALIORANG	312,000	475,000	2,025,000
7	SANGATTA - KAUBUN	312,000	610,000	2,295,000
8	SANGATTA - SANGKULIRANG	312,000	475,000	2,295,000
9	SANGATTA - MUARA WAHAU	312,000	950,000	3,240,000
10	SANGATTA - KONGBENG	312,000	1,050,000	3,375,000
11	SANGATTA - MUARA BENGKAL	312,000	1,150,000	3,575,000
12	SANGATTA - MUARA ANCALONG	312,000	1,215,000	4,185,000
13	SANGATTA - LONG MESANGAT	312,000	1,215,000	4,455,000
14	SANGATTA - BATU AMPAR	312,000	950,000	3,375,000
15	SANGATTA - TELEN	312,000	750,000	2,835,000
16	SANGATTA - KARANGAN	469,000	1,150,000	4,050,000
17	SANGATTA - BUSANG	469,000	-	6,885,000
18	SANGATTA - SANDARAN	469,000	2,295,000	9,855,000

Ketentuan :

1. Biaya Transportasi diatas merupakan biaya perjalanan pulang - pergi dari ibukota Kabupaten menuju Ibukota Kecamatan.
2. Biaya Bantuan Survey adalah Tambahan Biaya Transportasi dari Ibukota Kecamatan Menuju Wilayah Pedesaan dan diberikan dalam bentuk paket/Lumpsum.
3. Biaya Carter Kendaraan adalah biaya transportasi yang digunakan untuk lebih dari 1 (Satu) orang pelaksana Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan bukan merupakan biaya sewa kendaraan.
4. Biaya bantuan BBM perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas disesuaikan dengan tanda bukti pembelian BBM dari SPBU atau bukti pembelian yang sah. Apabila tidak mendapatkan bukti pembelian yang sah maka melampirkan surat pernyataan rill (khusus perjalanan dinas di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur yang tidak terdapat SPBU).

B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

KABUPATEN	SATUAN	DIKLAT	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)
KUTAI TIMUR	OH	Rp 130,000	Rp 170,000

BIAYA TAMBAHAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR	SATUAN	UANG KEMAHALAN	UANG KEGIATAN PEMERIKSAAN (KHUSUS INSPEKTORAT)
(1)	(2)	(3)	(4)
SANGATTA - SANGATTA UTARA	OH	Rp -	Rp -
SANGATTA - SANGATTA SELATAN	OH	Rp -	Rp -
SANGATTA - TELUK PANDAN	OH	Rp 100,000	Rp 100,000
SANGATTA - RANTAU PULUNG	OH	Rp 100,000	Rp 100,000
SANGATTA - BENGALON	OH	Rp 100,000	Rp 100,000
SANGATTA - KALIORANG	OH	Rp 200,000	Rp 100,000
SANGATTA - KAUBUN	OH	Rp 200,000	Rp 100,000
SANGATTA - SANGKULIRANG	OH	Rp 200,000	Rp 100,000
SANGATTA - MUARA WAHAU	OH	Rp 200,000	Rp 100,000
SANGATTA - KONGBENG	OH	Rp 200,000	Rp 100,000
SANGATTA - MUARA BENGKAL	OH	Rp 250,000	Rp 100,000
SANGATTA - MUARA ANCALONG	OH	Rp 250,000	Rp 100,000
SANGATTA - LONG MESANGAT	OH	Rp 250,000	Rp 100,000
SANGATTA - BATU AMPAR	OH	Rp 250,000	Rp 100,000
SANGATTA - TELEN	OH	Rp 250,000	Rp 100,000
SANGATTA - KARANGAN	OH	Rp 250,000	Rp 100,000
SANGATTA - BUSANG	OH	Rp 250,000	Rp 100,000
SANGATTA - SANDARAN	OH	Rp 250,000	Rp 100,000

Catatan :

1. Uang Kegiatan Pemeriksaan hanya untuk pejabat dan pegawai lingkup Inspektorat Kabupaten Kutai Timur.
2. Uang harian dan biaya tambahan perjalanan dinas dalam wilayah Kutai Timur diberikan secara Lumpsum.

C. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 125,000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp 100,000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 75,000

D. UANG PENGINAPAN DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

TARIF HOTEL (OH)						
WILAYAH / KECAMATAN		KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESSELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II DAN PEGAWAI HONORER
NO.		TINGKAT. A	TINGKAT. B	TINGKAT. C	TINGKAT. D	TINGKAT. E
1	KECAMATAN TELUK PANDAN	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 300,000
2	KECAMATAN BENGALON	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 500,000	Rp 300,000	Rp 300,000
3	KECAMATAN RANTAU PULUNG	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 300,000
4	KECAMATAN MUARA ANCALONG	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 300,000
5	KECAMATAN MUARA BENGKAL	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 300,000
6	KECAMATAN LONG MESANGAT	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 500,000	Rp 300,000	Rp 300,000
7	KECAMATAN BUSANG	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 500,000	Rp 300,000	Rp 300,000
8	KECAMATAN BATU AMPAR	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 300,000
9	KECAMATAN TELEN	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 300,000
10	KECAMATAN KALIORANG	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 300,000
11	KECAMATAN KAUBUN	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 300,000
12	KECAMATAN KARANGAN	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 300,000
13	KECAMATAN SANDARAN	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 300,000
14	KECAMATAN SANGATTA UTARA	Rp 1,500,000	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 400,000
15	KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Rp 1,500,000	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 400,000
16	KECAMATAN KONGBENG	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 600,000	Rp 400,000	Rp 400,000
17	KECAMATAN MUARA WAHAU	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 300,000
18	KECAMATAN SANGKULIRANG	Rp 1,500,000	Rp 1,000,000	Rp 800,000	Rp 300,000	Rp 300,000

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,

Jauhar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 101 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI TENTANG
PERJALANAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	BIAYA PEMETIAN	PENGANGKUTAN
1	**Tingkat A** Pejabat Negara Lainnya seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, serta Pejabat Lainnya yang setara	6,000,000	menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
2	**Tingkat B** untuk Anggota DPRD/Pejabat Eselon II dan Jabatan Fungsional Ahli Madya dan Utama, serta Pejabat lainnya yang setara.	4,800,000	
3	**Tingkat C** untuk Pejabat Esselon III/PNS Gol IV.	4,200,000	
4	**Tingkat D** untuk Pejabat Esselon IV/PNS Golongan III dan PPPK Golongan IX s/d XVII, Fungsional Ahli Pertama s/d Muda.	4,200,000	
5	**Tingkat E** PNS Golongan II, PNS Golongan I, Jabatan Fungsional Terampil, PPPK Golongan I s/d VIII dan Pegawai Honorer.	4,200,000	

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 101 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI TENTANG
PERJALANAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

Format Telaahan Staf Perjalanan Dinas:

KOP SKPD

TELAAHAN STAF

Kepada Yth	:	.....(atasan yang dituju)
Dari	:	.....(jabatan pembuat telaahan staf)
Tanggal	:	.....
Sifat	:	.....
Lampiran	:	.....
Perihal	:	.....(hal yang akan disampaikan)
I. Pokok Persoalan	:	.....(pernyataan singkat dan jelas tentang persolan yang akan di pecahkan)
II. Praanggapan	:	.....(dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dgn situasi yg dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian dimasa mendatang)
III. Fakta yang Mempengaruhi	:	.....(memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan)
IV. Analisis/Pembahasan	:	.....(memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan)
V. Simpulan	:	.....(memuat intisari hasil diskusin dan pilihan dan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi)
VI. Saran /Tindak Lanjut	:	.....(memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dan/atau permohonan persetujuan penugasan pejabat/staf yang ditunjuk) 1. ..... 2..... Dst
VII. Penutup	:	.....(kalimat penutup)

Sangatta,.....

.....(nama jabatan),

(.....)
NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,

Januar Eka Irawan, S.H.,M.H.
NIP. 19830112 201101 1 003

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 101 Tahun
PERATURAN BUPATI TENTANG
PERJALANAN DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DAN PEGAWAI HONORER DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2023

Format Surat Perintah / Surat Tugas Perjalanan Dinas:

KOP SKPD

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

.....(nama jabatan)

MEMERINTAHKAN :

Kepada

1. a. Nama : .....
   b. NIP : .....
   c. Pangkat/Golongan : .....
   d. Jabatan : .....
2. a. Nama : .....
   b. NIP/NRTK2D : .....
   c. Jabatan : .....

   dst.....
3. Tugas yang dilakukan : .....
4. Tempat Tujuan : .....

   Lamanya :
   a. Tanggal Berangkat : .....
   b. Tanggal Kembali : .....

Setelah melaksanakan tugas agar membuat laporan. Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : .....
Pada tanggal : .....

.....(nama jabatan)

(.....)
(NIP.....)

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,

Jamuel Rudi Irawan, S.H.,M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 101 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas:

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Transport		
2	Lumpsum Esselon/ Non Esselon/ Fungsional		
JUMLAH			

Telah dibayar sejumlah
Rp -

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

(.....)
NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp -

Yang Menerima,

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah	Rp	-
Yang telah dibayar semula	Rp	-
Sisa kurang /lebih	Rp	-

PPTK,

(.....)
NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP. 19830112 201101 1 003

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 101 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI TENTANG
PERJALANAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

Format Kuitansi/Bukti Pembayaran Perjalanan Dinas:

UNTUK DINAS
Lembar Ke .....

Tahun Anggaran :
Nomor BKU :
Kode Rekening :

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari : .....

Jumlah Uang : **Rp.....**

Terbilang : .....

Untuk Pembayaran : .....

Sesuai SPT Nomor :
Dengan Rincian Perhitungan Terlampir.

Sangatta, ...
Tanda Tangan Penerima

	Nama	Jumlah	Tanda Tangan
1.	.....	Rp.....	1.
2.	.....	Rp.....	2.
3.	.....	Rp.....	3.
dst...			

Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,	Lunas di bayar Sangatta, ... Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu,
(.....) NIP.	(.....) NIP.

Menyetujui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,

Jahun Dayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 101 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

Format Pernyataan Kebenaran Pengeluaran Biaya Riil Perjalanan Dinas:

KOP SKPD

PERNYATAAN KEBENARAN PENGELUARAN BIAYA RIIL

Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : .....
Tanggal ..... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya ..... (Transportasi/Penginapan/BBM) pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran meliputi :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	.....	.....

2. Jumlah uang tersebut pada poin 1 (satu), benar - benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kembali kelebihan tersebut ke Rekening Umum Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sangatta, ...
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

(.....)
NIP/NRTK2D

Mengetahui/Menyetujui,
PA / KPA

(.....)
NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,

Januar Baru Irawan, S.H.,M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 101 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI TENTANG
PERJALANAN DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DAN PEGAWAI HONORER DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2023

Format Laporan Hasil Perjalanan Dinas:

KOP SKPD

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

I. Pendahuluan
1. Dasar Pelaksanaan Tugas : Surat Perintah Tugas Nomor : .....
Tanggal : .....

2. Lamanya Perjalanan Dinas : ..... (.....) Hari

3. Pegawai yang ditugaskan : 1. .....
2. .....
3. .....
dst.....

II. Maksud dan Tujuan
.....(Maksud dan tujuan dari perjalanan dinas)

III. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
.....(Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan)

IV. Hasil
.....(hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, hal-hal lain yg perlu dilaporkan)

V. Penutup
..... (harapan/permintaan arahan/ucapan terimakasih)

Dibuat di : .....
pada tanggal : .....

Yang Membuat Laporan :

1. .....
2. .....
3. .....
dst.....

1. .....
2. .....
3. .....

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,

Jandar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 101 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

Format Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri:

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN
   A. Latar Belakang
   B. Dasar Hukum Kegiatan
   C. Tujuan dan Sasaran
   D. Ruang Lingkup Kegiatan
   E. Agenda Kegiatan
II. PELAKSANAAN
   A. Waktu dan Tempat
   B. Hasil Kegiatan
III. PEMBIAYAAN
IV. PENUTUP
   A. Rencana Tindak Lanjut
      1. Sasaran output untuk Pemda/Organisasi
      2. Sasaran outcome untuk Pemda/Organisasi
      3. Strategi pencapaian output dan outcome
   B. Hambatan dan Tantangan
V. Lampiran
   A. Surat permohonan rekomendasi dari Pemerintah Daerah
   B. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
   C. Surat Persetujuan (SP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretaris Negara
   D. Dokumentasi

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 101 Tahun 2022
PERATURAN BUPATI TENTANG
PERJALANAN DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN
PEGAWAI HONORER DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN

Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (Visum):

KOP SKPD

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
Nomor :

1	Pejabat yang memberi perintah	:
2	a. Nama Pegawai yang diperintahkan	:
3	a. Pangkat dan golongan menurut PGPS 1968	:
	b. Jabatan	:
	c. Gaji Pokok	:
	d. Tingkat menurut peraturan	:
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	:
6.	a. Tempat Berangkat	:
	b. Tempat Tujuan	:
7.	a. Lama Perjalanan Dinas	:
	b. Tanggal berangkat	:
	c. Tanggal harus kembali	:
8.	Pengikut - pengikut	: 1. 5. 2. 6. 3 7 4 8
9.	Pembebanan Anggaran	:
	a. Instansi	:
	b. Kode Rekening	:
10.	Keterangan lain - lain	: Setibanya ditempat tujuan yang dituju supaya SPPD ini diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat tersebut.

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

(Pejabat Yang Memberi Perintah)

(.....)
NIP.

Berangkat dari :
Ke :
Pada Tanggal :
Kepala : (Pejabat Yang Memberi Perintah)

(.....)
NIP.

II. Tiba di :
Pada tanggal :
Kepala :

Berangkat :
Ke :
Pada Tanggal :
Kepala :

III. Tiba di :
Pada Tanggal :
Kepala

Berangkat dari :
Ke :
Pada Tanggal :
Kepala

IV. Tiba di :
Pada Tanggal :
Kepala

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilaksanakan atas perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Pejabat Yang Memberi Perintah,

(.....)
NIP.

V. Keterangan lain - lain :

VI. ***PERHATIAN*** : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta Bendaharawan bertanggung jawab, berdasarkan Peraturan Keuangan Negara, menderita rugi akibat kesalahan dan kelalaian (angka 8 lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 No. B. 296/MK/I/4/1974)

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur,

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP. 19850112 201101 1 003